



SIP SUMBER
INSPIRASI
PENDIDIKAN

Median



EDISI

IKHTIAR TINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

**INI ERA MERDEKA
BALAJAR, BRO..!**

Majalah ini bisa diperoleh di
LPMP Jatim, atau silahkan unduh
di: <https://lpmpjatim.kemdikbud.go.id/site/category/majalah>



■ 4 KEBIJAKAN
REVOLUSIONER
PENDIDIKAN INDONESIA

■ MENCIPTAKAN
KEPEMIMPINAN
YANG MELAYANI

ISSN 0216-4035



9 770216 403582

GURU PENGGERAK HARUS DICARI

**BERANI
NJUR!
HEBAT!**

REVOLUSI PENDIDIKAN

PENDIDIKAN di era industri 4.0, nilai tidak lagi menjadi konsen utamanya. Namun *skill*, kompetensi, karakter dan kepribadian menjadi fokus utamanya. Pendidikan di abad ini setidaknya menuntut siswa memiliki keterampilan berkolaborasi, berfikir kritis, kreatif dan inovatif.

Empat kebijakan Merdeka Belajar memberi paradigma baru kepada kita untuk makin terbuka dan sadar bahwa penilaian pun tidak lagi hanya sebatas penilaian kognitif namun juga afektif dan psikomotorik.

Era ini menjadi jembatan pula menuju pendidikan masa depan yang tidak lagi hanya mengedepankan bukti fisik administrasi. Kepercayaan terhadap guru faktanya semakin tinggi. Penyekap kreatifitas guru berinovasi, yaitu RPP, kemasannya menjadi jauh lebih simpel.

Guru menjadi lebih bebas dalam mendesain pembelajaran yang efisien tanpa digandoli muatan-muatan yang malah membebani dan menghambat eksplorasinya.

Sebagian orang menganggap perubahan adalah hal yang menyulitkan dan penuh kerepotan. Namun, satu hal yang sebaiknya kita pegang, jangan terburu kaget dengan pola perubahan. Santai aja lah. Tidak perlu terburu menghakimi dan membanding-bandingkan dengan sistem sebelumnya. Terlebih memvonis gagal sebelum mencoba. ■

Redaksi



SIP
Median

Penanggung Jawab: **Dr. Bambang Agus Susetyo, M.M., M.Pd** | Pemimpin Editor: **Maryono, S.Sos., M.M** | Editor Teks: **Yuwandinta Hermawan** | Fotografer: **Anies Imanudin**

& **Rahadia Wiyoshastono** | Desain Grafis: **Ngakan Putu Agung Hariwibowo** | Pengumpul, Penyusun, Pengkolaborasi Materi & Fokus Pengembangan Isi, Ilustrasi, Desain, Program: **Bagus Priambodo** | Administrasi Umum: **Arum Wiwik Yudiarti & Zainal Arifin** | Digital Engineering: **Ari Ardhana** | Material Support: **Internal & Eksternal Lembaga** | Art & Design Support **DA Putranto** (RUMAH KREASI)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR

Jl. Ketintang Wiyata No. 15 Surabaya (Sb. IKIP Surabaya/UNESA)

telp. 031-8290243 | sms: 081234834444

email: set.lmpjatim@kemdikbud.go.id | web: <https://lmpjatim.kemdikbud.go.id/site/>

Sebagian foto untuk keperluan ilustrasi majalah dipenuhi dari GOOGLE IMAGE

■ KEBIJAKAN REVOLUSIONER

Mendikbud Tetapkan Empat Pokok Kebijakan Pendidikan 'Merdeka Belajar' | 04

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar".

Dorong Kemerdekaan Belajar Kemendikbud Lakukan Penyesuaian Ujian Sekolah dan Ujian Nasional | 06



Tahun 2021, Ujian Nasional Diganti Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter | 09

USBN Dihapus, Sekolah Bisa Selenggarakan Ujian Kelulusan Sendiri | 10

KURANGI BEBAN GURU

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Cukup Satu Halaman | 11



MENDIKBUD:

PPDB Sistem Zonasi Mengakomodasi Ketimpangan Akses dan Kualitas Pendidikan | 12

Sebagian Besar Kebijakan Kemendikbud ke Depan Terkait Guru | 14

PPDB 2020 Tetap Sistem Zonasi, Kuota Jalur Prestasi Ditambah | 16

Merdeka Belajar Kunci dalam Pembelajaran Guru dan Murid | 17

■ MERDEKA BELAJAR | 18

■ TANYA - JAWAB | 22

■ UDIK

Tiga Menteri Perankan Drama Unik, Berikan Pesan Antikorupsi kepada Siswa | 30



■ MSG

Menciptakan Kepemimpinan yang Melayani di Dunia Pendidikan | 32

Saat berbicara dalam ajang Simposium Internasional Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah pada 25 November 2019 di Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkapkan konsep kepemimpinan yang melayani (servant leadership) yang diharapkan bisa diterapkan di dunia pendidikan.

Membangun Pendidikan Bermutu Mustahil Tanpa Kolaborasi | 34

Menjadi Guru yang Bisa Digugu dan Ditiru | 36

Guru Penggerak Harus Dicari, Dilindungi, dan Dimotivasi | 38

Di setiap lingkungan, selalu ada sosok-sosok penggerak. Mereka adalah sosok-sosok yang berani melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah perubahan yang positif. Seringkali, mereka bahkan berani mendobrak tradisi karena didorong oleh misi mewujudkan kondisi yang lebih baik dari yang sebelumnya.

Apakah Benar Kita Butuh Ujian Nasional? | 39



■ INSIDE SCHOOL

Manajemen 'KOPI' & Bengkel Karakter SMK Brantas Kabupaten Malang Jawa Timur | 40

Sekolah Menengah Kejuruan atau yang disingkat SMK adalah jenjang pendidikan yang memang menyiapkan para lulusannya untuk memasuki dunia kerja. SMK Brantas Karangates adalah salah satu SMK swasta di Kabupaten Malang yang merupakan Sekolah Model SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) Binaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur.

■ MENGEJAR MUTU

Mendikbud Lantik Empat Pejabat Tinggi Madya | 42



Mendikbud: Pertajam Fungsi Koordinasi Birokrasi, Perkuat Regulasi yang Solutif | 43

Tingkatkan Kompetensi ASN, Kemendikbud Gelar Rakor Pelatihan 2019 | 44



■ TEROPONG

BERKACA DARI STUDI PISA 2018:

Guru dan Orangtua Harus Menjadi Partner yang Kompak | 46

Membangun Literasi Harusnya Dimulai dari Rumah | 47

Buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku, anak akan diajak membuka pikirannya untuk memandang cakrawala yang lebih luas di luar lingkungannya.

Anak-anak Indonesia Butuh Lebih Banyak Perpustakaan | 48



Tak Hanya Pemerataan Mutu Pendidikan, Gerakkan Perubahan di Kelas Juga Diperlukan | 50

Ungkapan 'Tuntutlah Ilmu Sampai ke Negeri Cina', secara literal mungkin masih sangat relevan hingga kini. Pasalnya, saat ini kita bisa melihat bagaimana negeri Tirai Bambu tersebut berkembang sedemikian pesat, khususnya di bidang teknologi.

Melahirkan Pustakawan Profesional Demi Tumbuhnya Kemampuan Literasi | 52



■ GLOBALISASI & STRATEGI

Pendidikan Berdaya Saing Global | 54

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim hadir menyampaikan kuliah umum pada acara Musyawarah Nasional ke-5 Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (16/12/2019). Mendikbud menyampaikan materi tentang Pendidikan Berdaya Saing Global.

Moda Penting Penggerak Inovasi Pendidikan untuk Revolusi 4.0 | 58





Mendikbud Tetapkan Empat Pokok Kebijakan Pendidikan 'Merdeka Belajar'

Jakarta, Kemendikbud --- Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar". Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan

Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

"Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran kedepan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia," demikian disampaikan Mendikbud pada peluncuran Empat Pokok Kebijakan Pendidikan "Merdeka Belajar", di Jakarta, Rabu (11/12).

Arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN, kata Mendikbud, pada tahun 2020 akan diterapkan dengan

ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya). "Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran,"



terang Mendikbud.

Selanjutnya, mengenai ujian UN, tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN untuk terakhir kalinya. "Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," jelas Mendikbud.

Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. "Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS," tutur Mendikbud.

Sedangkan untuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan



pembelajaran, dan asesmen. "Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup," jelas Mendikbud.

Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen,

jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. "Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi," ujar Mendikbud.

Mendikbud berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam pemerataan akses dan kualitas pendidikan. "Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru," pesan Mendikbud.

Pada kesempatan ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memberikan apresiasi kepada Mendikbud atas gagasan "Merdeka Belajar". "Kami mendukung inisiatif Kemendikbud mengangkat gagasan tersebut. Dengan kebijakan ini guru dapat lebih fokus pada pembelajaran siswa dan siswa pun bisa lebih banyak belajar. Mari kita semua bersikap terbuka dan optimis dalam menyongsong perubahan ini," pungkas Menko PMK. ■



Info lebih lanjut mengenai empat pokok kebijakan merdeka belajar:

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/empat-pokok-kebijakan-merdeka-belajar> (www.kemdikbud.go.id)

Dorong Kemerdekaan Belajar

KEMENDIKBUD LAKUKAN PENYESUAIAN UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL



Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pada tahun 2020, Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diganti dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Sementara ujian nasional (UN) akan segera diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter pada tahun 2021.

Mendikbud menegaskan bahwa penyesuaian kebijakan perlu dilakukan untuk mengembalikan esensi dari asesmen atau penilaian yang semakin dilupakan. Yakni, untuk memberikan umpan balik bagi pembelajaran.

“Konsepnya mengembalikan kepada esensi undang-undang kita untuk memberikan kemerdekaan sekolah untuk menginterpretasi kompetensi-

kompetensi dasar kurikulum kita menjadi penilaian mereka sendiri,” disampaikan Mendikbud dalam Rapat Koordinasi dengan para Kepala Dinas Pendidikan seluruh Indonesia di Jakarta, Rabu (11/12).

“Yang lebih cocok untuk murid-murid mereka, lebih cocok untuk daerah mereka, lebih cocok untuk kebutuhan pemelajaran murid mereka,” imbuhnya.

Mendatang, USBN tidak hanya terpaku pada pola yang sudah dijalankan selama beberapa tahun terakhir. Namun, ujian sekolah dapat berupa tes kompetensi tertulis dan/atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan oleh guru.

Kini sekolah diberikan ruang yang lebih bebas untuk menyelenggara-

kan sebuah asesmen mandiri yang diyakini lebih baik atau lebih holistik untuk mengukur kompetensi peserta didiknya. “Bayangkan betapa banyaknya inovasi yang bisa dilakukan guru penggerak dan kepala sekolah penggerak dengan adanya kemerdekaan ini,” kata Mendikbud.

Terkait kesiapan penyelenggaraan asesmen di tingkat sekolah, Mendikbud menegaskan bahwa hal tersebut menjadi hak setiap sekolah. Bilamana sekolah belum siap menyelenggarakan sesuai konsep yang baru dan masih menggunakan pola lama, tidak menjadi persoalan. “Untuk yang tidak mau berubah, menggunakan pola lama, itu silakan. Tetapi bagi yang ingin berubah, itu jangan disia-siakan,” tutur Nadiem.

Adapun penyusunan soal un-

tuk asesmen yang diselenggarakan sekolah, dikatakan Mendikbud dapat bersumber dari mana saja. Asalkan mengacu pada Kurikulum 2013 dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. "Boleh ambil dari sekolah lain, meminta opini dari dinas. Silakan. Tetapi sudah tidak boleh dipaksakan. Itu bedanya," tutur Mendikbud.

PERUBAHAN ASESMEN NASIONAL

Selain perubahan pola asesmen yang diselenggarakan sekolah, Mendikbud juga memandang perlunya mengembalikan tujuan asesmen tingkat nasional sebagai tolok ukur bagi setiap sekolah atau sebuah sistem pendidikan. Tahun 2020 menjadi tahun terakhir penyelenggaraan Ujian Nasional untuk kemudian diganti dengan sebuah sistem asesmen untuk mengukur kompetensi minimal serta survei karakter.

"Secara teknis, nanti detilnya kita masih dalam pengembangan. Tetapi sudah pasti akan dilaksanakan melalui komputer. Apapun yang berstandar nasional itu harus berbasis komputer," terang Mendikbud.

Asesmen pengganti UN ini dirancang untuk dilakukan pada pertengahan jenjang, misalnya pada kelas 4, 8, dan 11. "Ini tes yang harus diambil di tengah jenjang dan itu bukan untuk menjadi alat seleksi untuk murid. Dan bisa menjadi alat formatif bagi sekolahnya dan gurunya untuk memperbaiki pembelajaran," jelas Mendikbud.

Hasil asesmen nasional nantinya diharapkan dapat mendorong perbaikan pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. "Agar itu (hasil asesmen) dapat memberikan waktu bagi sekolah itu dan guru-gurunya untuk melakukan perbaikan yang dibutuhkan," ungkap Mendikbud.

Asesmen pengganti UN ini akan lebih fokus pada keterampilan penalaran tingkat tinggi yang mendorong

siswa melakukan analisis. Tiga kemampuan bernalar yang disasar di antaranya adalah kemampuan menggunakan bahasa (literasi), matematika (numerasi), serta penguatan pendidikan karakter. "Jadi, tidak ada lagi materi atau mata pelajaran yang harus dihafalkan. Satu-satunya cara adalah melakukan pembelajaran dengan baik," kata Nadiem.

Sementara itu, survei karakter dijelaskan Mendikbud sebagai upaya untuk memotret pemahaman siswa yang tercermin dalam opini pribadinya. "Ini adalah keharusan. Kalau kita tidak melakukan survei karakter, maka kita sama sekali tidak mengetahui kondisi keamanan, kondisi kerukunan, kondisi akhlak dari murid kita. Padahal itu



bagian dari pendidikan," terangnya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Totok Suprayitno mengatakan bahwa pelaksanaan ujian yang diselenggarakan sekolah dan ujian nasional untuk tahun 2020 telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 43 Tahun 2019.

Dalam Permendikbud tertanggal 10 Desember 2019 tersebut dijelaskan bahwa sistem pendidikan harus mendorong tumbuhnya praktik belajar-mengajar yang menumbuhkan daya nalar dan karakter peserta didik secara

utuh. Untuk itu, maka satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk berinovasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik. Salah satunya disebutkan oleh Totok adalah melalui asesmen yang digunakan untuk melakukan perbaikan pada pembelajaran.

Ragam soal yang akan diujikan dalam asesmen pengganti UN berupa kombinasi dari berbagai variasi model "Variasinya bisa banyak. Kombinasi antara esai, pilihan benar salah, mengurutkan, *re-arrange*, juga jawaban pendek. Tidak hanya satu jawaban," kata Kabalitbang.

Kendati telah menetapkan penyesuaian kebijakan terkait asesmen

nasional pengganti UN, tetapi sampai saat ini Kemendikbud belum menentukan nama asesmen dan survei karakter tersebut. "Nanti kita carikan nomenklatur yang pas dan mudah diingat. Intinya sekarang yang bisa disampaikan, pengganti UN itu adalah Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter," ungkap Totok.

RESPON PEMERINTAH DAERAH

"Saya ingin membuktikan kepada Bapak dan Ibu, bahwa proses pembelajaran di tingkat apapun membutuhkan interaksi, membutuhkan gotong royong, membutuhkan debat, butuh diskusi, dan butuh pemikiran kritis," disampaikan Mendikbud usai mendengarkan pemaparan beberapa perwakilan kelompok dalam sesi diskusi untuk penyampaian tanggapan terhadap program "Merdeka Belajar" yang baru saja disampaikannya.

Mendikbud Nadiem mengetahui ada pihak yang mempertanyakan mengenai kesiapan guru dan sekolah dalam melaksanakan program "Merdeka Belajar". Namun, ia berpesan kepada para Kepala Dinas yang hadir agar tidak memandang remeh atau pesimis kepada para guru. "Jangan meremehkan guru-guru dan kepala sekolah kita," ujarnya.

Mendikbud meminta agar publik dan para pembuat kebijakan meyakini bahwa proses pembelajaran di dalam kelas perlu dilakukan dengan diawali reinterpretasi kurikulum dan asesmen. "Kalau guru-guru tidak melalui ini, maka tidak akan ada proses pembelajaran di dalam kelas. Ini kuncinya," jelas Mendikbud.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Sigit Muryono menyampaikan apresiasinya terhadap empat penyesuaian kebijakan yang disampaikan Mendikbud.

"Saya menyambut baik. Tetapi perlu dilengkapi dengan revitalisasi sistem. Keterkaitan antara semua komponen," tuturnya.

"Harus ada sosialisasi pemahaman guru, kepala sekolah, pengawas, termasuk pejabatnya," imbuh Kadis Sigit.

Sigit berharap agar pemerintah pusat terus melakukan pendampingan penguatan kapasitas guru. Khususnya dalam melakukan asesmen atau penilaian dalam mengukur kompetensi siswa. Baik dari ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik.

"Itu guru kuncinya. Guru-guru harus ditingkatkan pengetahuan dalam penilaian. Bahwa menilai itu bukan sekadar mengukur. Ada banyak aspek di dalam penilaian, di dalam memberikan evaluasi terhadap peserta didik," tutur Sigit.

Menindaklanjuti arahan Mendikbud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara siap melakukan langkah-langkah strategis terkait guru. Dijelaskan Sigit, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara akan melakukan revitalisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) serta Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Salah satu wujud konkretnya adalah mendorong kemitraan asosiasi profesi guru dengan perguruan tinggi dalam melakukan riset pengembangan. "Kemitraan MGMP dan KKG (dengan perguruan tinggi) itu dapat berupa penelitian tindakan kelas, bisa kerja bersama, bisa untuk pendalaman materi, dan lain sebagainya," kata Kadisdikbud Provinsi Kaltara.

Lebih lanjut, Sigit menyampaikan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah diupayakan oleh pemerintah daerah tidak akan sia-sia. "Yang tadinya (fasilitas

TIK) awalnya untuk memenuhi kepentingan ujian nasional, sekarang kita breakdown lebih luas. Untuk pemelajaran, untuk media bagi guru, kemudian penguatan untuk pengembangan profesi guru," terangnya.

Ditambahkan Sigit, mendatang, penyampaian rencana kerja dan laporan kinerja guru ataupun sekolah

di Provinsi Kaltara dapat difasilitasi dengan perangkat TIK dan akses Internet yang telah disediakan di setiap sekolah. Hal ini sejalan dengan semangat Mendikbud untuk menyederhanakan kewajiban administrasi guru.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara, Papua, Mikael Ury, pada prinsipnya mendukung program Mendikbud. Tetapi, ia berharap adanya penguatan dan pendampingan dari pemerintah pusat.

Sebagai pengelola pendidikan di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), Kadisdik Ury mengatakan bahwa Kabupaten Tolikara masih memerlukan dukungan penyediaan guru dan pembiayaan, serta sarana prasarana pendidikan. ■

(www.kemdikbud.go.id)

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, tahun 2020 akan menjadi tahun terakhir pelaksanaan ujian nasional (UN). UN pada tahun 2021 akan diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Asesmen tersebut tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi kurikulum seperti yang selama ini diterapkan dalam ujian nasional, melainkan melakukan pemetaan terhadap dua kompetensi minimum siswa, yakni dalam hal literasi dan numerasi.

"Literasi di sini bukan hanya kemampuan membaca, tetapi kemampuan menganalisis suatu bacaan, dan memahami konsep di balik tulisan tersebut. Sedangkan kompetensi numerasi berarti kemampuan menganalisis menggunakan angka. Dua hal ini yang akan menyederhanakan asesmen kompetensi minimum yang akan dimulai tahun 2021. Jadi bukan berdasarkan mata pelajaran dan penguasaan materi. Ini kompetensi minimum atau kompetensi dasar yang dibutuhkan murid-murid untuk bisa belajar," tutur Mendikbud dalam Rapat Koordinasi Mendikbud dengan Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Sementara terkait survei karakter, lanjut Mendikbud, dilakukan untuk mengetahui data secara nasional mengenai penerapan asas-asas Pancasila oleh siswa Indonesia. Menurutnya, selama ini secara nasional data pendidikan yang dimiliki berupa data kognitif. "Kita tidak mengetahui apakah asas-asas Pancasila benar-benar dirasakan oleh siswa di Indonesia. Kita akan mengadakan survei, misalnya bagaimana implementasi gotong royong, apakah kebahagiaan anak di sekolah sudah mapan. apakah masih ada *bullying*? Survei ini akan menjadi suatu panduan buat sekolah dan buat kami di Kemendikbud," kata Mendikbud.

Survei karakter tersebut akan dijadikan tolok ukur untuk bisa memberikan umpan balik atau *feedback* ke

SISTEM PENDIDIKAN HARUS MENDORONG TUMBUHNYA PRAKTIK BELAJAR-MENGAJAR YANG MENUMBUHKAN DAYA NALAR DAN KARAKTER PESERTA DIDIK SECARA UTUH. UNTUK ITU, MAKA SATUAN PENDIDIKAN DIBERIKAN KELELUASAAN UNTUK BERINOVASI DALAM MENCIPTAKAN LINGKUNGAN BELAJAR YANG BERPIHAK PADA PESERTA DIDIK.



Tahun 2021, Ujian Nasional Diganti Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter

sekolah-sekolah agar dapat menciptakan lingkungan sekolah yang membuat siswa lebih bahagia dan lebih kuat dalam memahami dan menerapkan asas pancasila.

Waktu pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter akan dilakukan di tengah jenjang pendidikan, bukan di akhir jenjang seperti pada pelaksanaan ujian nasional. Mendikbud mengutarakan setidaknya ada dua alasan mengapa pelaksanaannya dilakukan di tengah jenjang.

“Pertama, kalau dilakukan di tengah jenjang akan bisa memberikan waktu untuk sekolah dan guru dalam melakukan perbaikan sebelum anak lulus di jenjang itu. Kedua, karena dilaksanakan di tengah jenjang, jadi tidak bisa digunakan sebagai alat seleksi siswa, sehingga tidak menimbulkan stres pada anak-anak dan orang tua akibat ujian yang sifatnya formatif,” ujarnya.

Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter akan diselenggarakan Kemendikbud bekerja sama dengan organisasi pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri seperti OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Langkah tersebut diambil agar asesmen memiliki kualitas yang baik dan setara dengan kualitas internasional dengan tetap mengutamakan kearifan lokal. “Kita bergotong royong untuk menciptakan kompetensi lebih baik bagi anak-anak kita,” tutur Mendikbud.

Perubahan kebijakan ujian nasional yang akan diganti dengan asesmen tersebut dilakukan berdasarkan hasil survei dan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan, antara lain guru, siswa, dan orang tua. Menurut Mendikbud, selama ini materi ujian nasional terlalu padat sehingga fokus

siswa cenderung menghafal materi dan bukan pada kompetensi belajar. Hal ini menimbulkan beban stres pada siswa, guru, maupun orang tua, karena ujian nasional justru menjadi indikator keberhasilan belajar siswa sebagai individu.

“Padahal tujuan UN adalah untuk melakukan asesmen terhadap sistem pendidikan secara nasional. Jadi UN selama ini hanya menilai satu aspek, yaitu kognitif saja, bahkan tidak semua aspek kognitif dites. UN lebih ke penguasaan materi, belum menyentuh karakter siswa lebih holistik,” ujar Mendikbud. Ia menambahkan, secara nasional, pendidikan memang membutuhkan tolok ukur. Tapi apa yang diukur dan siapa yang diukur itulah yang akan diubah melalui pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. ■

(www.kemdikbud.go.id)

USBN Dihapus, Sekolah Bisa Selenggarakan Ujian Kelulusan Sendiri

Jakarta, Kemendikbud --- Mulai tahun 2020, Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diganti dengan ujian kelulusan yang diselenggarakan oleh masing-masing sekolah. Sekolah bisa menyelenggarakan ujian kelulusan sendiri dengan tetap mengikuti kompetensi dasar yang ada pada Kurikulum 2013. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, kebijakan tersebut diambil dengan mengedepankan semangat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

"Untuk tahun 2020, USBN akan diganti, dikembalikan ke esensi UU Sisdiknas. Semangat di UU Sisdiknas sudah jelas bahwa murid dievaluasi oleh guru, dan kelulusan ditentukan oleh suatu penilaian yang dilakukan oleh sekolah. Itu semangatnya UU Sisdiknas," ujar Mendikbud Nadiem Makarim dalam Rapat Koordinasi Mendikbud dengan Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tercantum BAV XVI tentang Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi. Pada Pasal 58 tertulis, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Ini berarti evaluasi atau penilaian hasil belajar siswa dilakukan oleh guru di sekolah terkait.

Menurut Mendikbud, saat ini yang terjadi adalah, dengan adanya USBN semangat kemerdekaan sekolah dalam menentukan penilaian yang tepat untuk siswa menjadi tidak optimal, karena anak-anak harus mengerjakan soal yang berstandar. Sementara soal-soal tersebut kebanyakan berbentuk pilihan ganda yang formatnya hampir sama dengan ujian nasional (UN).

"Kurikulum 2013 sebenarnya



semangatnya adalah kurikulum berdasarkan kompetensi. Nah, kompetensi dasar yang ada di Kurikulum 2013 sebenarnya sangat sulit jika hanya dites dengan pilihan ganda, karena tidak cukup untuk mengetahui berbagai kompetensi," tutur Mendikbud.

Namun ia menegaskan, bagi sekolah yang belum siap mengubah tes kelulusannya, diperbolehkan tetap menyelenggarakan tes kelulusan seperti USBN pada tahun lalu. "Ini harus saya tekankan. Jadi tidak memaksakan sekolah untuk berubah. Kalau sekolah belum siap melakukan perubahan dan masih mau menggunakan format USBN tahun lalu, dipersilakan. Tetapi bagi sekolah yang ingin melakukan perubahan dengan melakukan penilaian lebih holistik, diperbolehkan," katanya.

Mendikbud menuturkan, pilihan ini menciptakan kesempatan bagi sekolah untuk melakukan penilaian di luar hal yang selama ini hanya berupa soal pilihan ganda. Dengan begitu, sekolah bisa melakukan penilaian terhadap siswa

melalui bentuk lain seperti esai, portofolio, dan penugasan lain seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lain-lain.

"Kita ingin memberikan kemerdekaan bagi guru penggerak di seluruh Indonesia untuk menciptakan konsep-konsep penilaian yang lebih holistik yang benar-benar menguji kompetensi dasar kurikulum kita, bukan hanya pengetahuan atau hafalan saja," ujar Mendikbud.

Ia menambahkan, bagi pemerintah daerah yang sudah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan USBN di tahun 2020, anggaran tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan kapasitas guru dan kualitas pembelajaran. "Tapi untuk tahun 2020, bagi sekolah-sekolah yang ingin menciptakan asesmen yang lebih holistik, ini adalah kesempatan. Bagi guru-guru penggerak dan kepala sekolah penggerak, mohon jangan sia-siakan kesempatan ini. Namun ini juga bukan pemaksaan bagi guru dan kepala sekolah yang belum siap. Ini adalah kebijakan USBN kita," kata Mendikbud. ■

(www.kemdikbud.go.id)



KURANGI BEBAN GURU

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Cukup Satu Halaman

Jakarta, Kemendikbud --- Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menjadi salah satu inisiatif Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam mengeluarkan kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”. Menurut Mendikbud, inisiatif penyederhanaan RPP ini didedikasikan untuk para guru agar meringankan beban administrasi guru. RPP yang sebelumnya terdiri dari belasan komponen, kini disederhanakan menjadi tiga komponen inti yang dapat dibuat hanya dalam satu halaman.

“Jadi yang tadinya ada belasan komponen, kita bikin jadi tiga komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian pembelajaran,” ujar Mendikbud dalam Rapat Koordinasi Mendikbud dengan Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia di Jakarta, Rabu (11/12/2019). Ia menambahkan, selanjutnya Kemendikbud akan memberikan beberapa contoh RPP singkat yang cukup dikerjakan dalam satu halaman namun tetap berkualitas.

Hal yang penting dalam sebuah RPP, lanjut Mendikbud, bukan tentang penulisannya, melainkan tentang proses refleksi guru terhadap pembelajaran yang terjadi. “Sebenarnya esensinya RPP atau *lesson plan* adalah proses refleksi daripada guru itu. Pada saat dia menulis suatu RPP, dia laksanakan di kelas besoknya, lalu dia kembali pada RPP itu untuk melakukan refleksi. Tercapai enggak, apa yang dia maksudkan? Dari situlah pembelajaran terjadi. Jadi bukan dengan menulis 10 halaman sekadar buat administrasi,” tuturnya.

Ia pun meminta para kepala dinas pendidikan yang hadir dalam rapat koordinasi untuk mengomunikasikan kebijakan ini kepada pengawas sekolah di wilayahnya masing-masing agar mereka mengerti esensi dari RPP. “Agar (RPP) dilakukan tapi tidak menjadi beban terlalu berat, karena esensinya adalah proses yang terjadi. Itu yang penting,” tegasnya.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, Ren-

cana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD).

Dengan adanya kebijakan baru tentang penyederhanaan RPP ini, guru bebas membuat, memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Efisien berarti penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Efektif berarti penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berorientasi pada murid berarti penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar murid di kelas. Guru dapat tetap menggunakan format RPP yang telah dibuat sebelumnya, atau bisa juga memodifikasi format RPP yang sudah dibuat. ■

(www.kemdikbud.go.id)



MENDIKBUD: **PPDB Sistem Zonasi** **Mengakomodasi Ketimpangan** **Akses dan Kualitas Pendidikan**

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, meluncurkan empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”, salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi. Penerapan PPDB akan lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah.

Hal tersebut diutarakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dalam Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta (11/12). “Zonasi sangat penting dan kami mendukung

penuh inisiatif zonasi. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu kami berdiskusi intensif dengan guru, kepala sekolah, pengawas, dan seluruh stakeholder pendidikan baik di dalam maupun luar negeri, supaya sistem zonasi dapat kita rancang lebih baik lagi,” terang Mendikbud.

Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Komposisi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019, memberikan penambahan porsi

untuk jalur prestasi dan afirmasi.

“Kebijakan zonasi esensinya adalah adanya (jalur) afirmasi untuk siswa dan keluarga pemegang KIP yang tingkat ekonominya masih rendah, serta bagi yang menginginkan (adanya) peningkatan jalur prestasi sampai maksimal 30% diperbolehkan,” kata Mendikbud.

Terbitnya Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, kata Mendikbud, salah satunya mengakomodir aspirasi orang tua yang ingin prestasi anaknya lebih dihargai dalam menentukan pilihan sekolah terbaik. “Banyak ibu-ibu yang komplain anaknya sudah belajar keras untuk mendapat hasil yang diinginkan. Jadi (aturan) ini adalah kompromi di antara kebutuhan pemerataan



pendidikan bagi semua jenjang pendidikan, sehingga kita bisa mengakses sekolah yang baik dan juga kompromi bagi orangtua yang sudah kerja keras untuk (anaknya) mencapai prestasi di kelas maupun memenangkan lomba-lomba di luar sekolah, di mana mereka bisa mendapatkan pilihan bersekolah di sekolah yang diinginkan,” ungkapnya pada sesi jumpa pers.

Mendikbud mengatakan bahwa kebijakan ini tidak mungkin terealisasi tanpa adanya dukungan dari seluruh jajaran unit pelaksana teknis (UPT) Kemendikbud, dan pemerintah daerah, serta para pelaku pendidikan lainnya. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam pemerataan akses

dan kualitas pendidikan. “Kemendikbud tidak bisa melakukan ini tanpa bantuan dari berbagai pihak. Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi,” tekannya saat mengenalkan kebijakan “Merdeka Belajar”.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy tidak hanya memberikan apresiasi namun juga memberi semangat kepada Mendikbud atas gagasan.

“Merdeka Belajar”, yang salah satu poinnya adalah tentang zonasi. “Sejak dulu saya tidak menyukai kastanisasi sekolah. Dengan keberlanjutan sistem zonasi ini, malah makin bagus, kondisi di sekolah akan semakin heterogen.”

Lebih lanjut, Menko Muhadjir membagi pengalamannya saat dulu bermunculan komentar negatif atas konsep zonasi yang ia terbitkan. “Beberapa pihak merasa saya mempersulit peserta didik yang berprestasi untuk mencapai masa depan yang lebih baik, karena mereka terpaksa harus masuk di lingkungan sekolah yang tidak sesuai dengan harapannya,” kenangnya.

Menjawab hal itu, ia menyampaikan bahwa kebijakan yang ia ambil tersebut adalah wujud nyata dari Pancasila yang mengamatkan bahwa idealnya pendidikan yang berkualitas harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. “Zonasi ini bagus, bukti bahwa negara kita berkeadilan, berasaskan Pancasila. Nilai inilah yang ingin kita tonjolkan. Nilai itu bersumber dari logika, etika, dan estetika, apa yang kita putuskan kembalikan lagi ke falsafah kita bersama, Pancasila. Oleh karena itu, jangan sampai bosan memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi peserta didik kita,” pesannya.

ZONASI MENCAKUP PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS GURU

Zonasi tidak hanya mengatur pemerataan kualitas sekolah dan peserta didik, namun juga menitikberatkan pada peran dan komposisi guru di

suatu daerah. Mendikbud mengingatkan, bahwa kebijakan ini harus dise-laraskan dengan pemerataan kuantitas dan kualitas guru di seluruh daerah.

“Pemerataan tidak cukup hanya dengan zonasi. Dampak yang lebih besar lagi adalah pemerataan kuantitas dan kualitas guru. Inilah yang banyak manfaatnya terhadap pemerataan pendidikan,” terang Mendikbud.

Tercapainya pemerataan kualitas pendidikan adalah tugas bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah termasuk segenap pemangku kepentingan di dunia pendidikan. Menteri Nadiem berharap, melalui pertemuan ini, para pimpinan UPT Kemendikbud mencapai kata sepakat untuk mendukung terlaksananya zonasi hingga menyentuh kepada para pendidik dan tenaga kependidikan di daerah.

“Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru. Kalau ada satu sekolah yang banyak guru berkumpul di situ (maka) lakukan distribusi yang lebih adil bagi siswa di dalam sekolah,” terangnya.

Di akhir arahannya, Mendikbud mengajak para peserta mulai bergerak memetakan kuantitas guru di sekolah terlebih dahulu. “Itulah yang saya butuhkan dukungan bapak dan ibu semua untuk melakukan evaluasi paling tidak (terhadap) kuantitas guru. Mohon jadikan ini sebagai prioritas nomor satu. Bagi sekolah yang kekurangan guru, lakukan distribusi yang baik demi siswa kita,” tekannya.

Hal senada juga dituturkan Menko PMK Muhadjir Effendy yang dalam pidatonya menyebutkan agar kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik supaya guru dapat lebih fokus pada pembelajaran siswa dan siswa pun bisa lebih banyak belajar. “Mari kita semua bersikap terbuka dan optimis dalam menyongsong perubahan ini,” pungkas Menko PMK. ■

(www.kemdikbud.go.id)



Sebagian Besar Kebijakan Kemendikbud ke Depan Terkait Guru

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim memaparkan empat pokok kebijakan dalam program Merdeka Belajar kepada Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rapat Kerja dengan Komisi X. Mendikbud menjelaskan bahwa sebagian besar kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ke depan akan berkaitan dengan guru.

"Kita tidak mungkin meningkatkan kapasitas guru kalau guru masih terbelenggu dengan hal-hal administratif yang menyita waktu dan yang tidak berhubungan langsung dengan pembelajaran," dikatakan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/12/19).

Mendikbud menyebutkan bahwa ujian sekolah dengan format baru yang menggantikan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) esensinya adalah mengembalikan kedaulatan guru dan sekolah untuk memberikan penilaian kepada peserta didiknya. "Kurikulum 2013 itu standar nasional. Bagaimana

penilaian dan bentuk soalnya bentuk tesnya itu yang seharusnya menjadi kedaulatan sekolah," ujar Nadiem.

Mendikbud meminta agar anggota legislatif dan masyarakat pada umumnya tidak meremehkan kemampuan guru. Karena pada kebebasan yang diberikan juga terkandung tanggung jawab pendidik. "Dengan demikian rasa tanggung jawab dan *ownership* -nya meningkat. Sehingga ia (guru), akan terus mencari cara untuk menjadikan lebih baik," ujar Nadiem.

Terkait penggantian ujian nasional dengan asesmen kompetensi minimal dan survei karakter, Mendikbud memastikan hal tersebut telah dikaji dengan saksama. Tiga materi utama yang diberikan dalam asesmen kompetensi minimal dan survei karakter, yakni penalaran menggunakan bahasa (literasi), matematika (numerasi), dan karakter telah mencakup kompetensi dasar yang juga berlaku secara internasional.

"Ini merupakan suatu kompetensi fundamental yang kita pilih. Ini merupakan kompetensi inti untuk belajar apapun," kata Mendikbud Nadiem.

Sedangkan di dalam survei karakter,

Mendikbud meyakini bahwa survei tersebut tidak akan berupa tes hafalan tentang sila-sila Pancasila. Tetapi, dibuat dengan format sederhana dan fokus untuk mengetahui seberapa besar nilai-nilai Pancasila telah mengakar pada diri para siswa. Dicontohkan Mendikbud, seperti pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai gotong royong, keadilan, ataupun toleransi. Melalui survei ini, Kemendikbud juga berharap dapat menemukan kondisi kesejahteraan (*well being*) para siswa.

Anggota Komisi X, Andreas Hugo Pareira, mengungkapkan pada prinsipnya ia setuju dan mengapresiasi kebijakan baru yang diluncurkan Mendikbud. "Ini keliatannya sederhana tetapi sangat revolusioner," katanya.

Namun, Hugo mengingatkan agar kebijakan yang lebih memberikan kebebasan kepada pendidik ini dapat benar-benar dikawal Kemendikbud dengan memberikan penguatan dan pendampingan kepada para guru.

"Guru harus memahami kebebasan yang diberikan kepada dia. Sehingga tidak terjadi anarki. Karena tidak semua orang itu sama pemahamannya," pesan

anggota legislatif dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur ini.

Senada dengan itu, Lathifah Shohib, mengusulkan peningkatan kapasitas guru, khususnya terkait kemampuan melakukan evaluasi belajar dan menyusun soal. Apalagi setelah sekian lama terbiasa menunggu soal dari Kemendikbud ataupun dinas pendidikan. "Sepe-ngetahuan saya menyusun soal itu perlu mempertimbangkan validitas dan realibilitas soal itu," ujar anggota legis-latif dari Jawa Timur ini.

Kemudian Zainuddin Maliki menyampaikan bahwa ujian nasional yang diselenggarakan selama ini memang perlu dan sudah saatnya dilakukan evaluasi. "Kita hanya akan menjadikan pendidikan kita mengatakan bahwa anak dengan skor tes yang tinggi adalah yang berprestasi," ujarnya.

Maliki mengapresiasi langkah strategis perubahan evaluasi belajar ke arah yang lebih fokus kepada kompetensi. "Pak Menteri melakukan dekonstruksi terhadap narasi yang selama ini disakralkan," ungkapnya.

Namun, anggota legislatif dari dapil Jawa Timur VIII ini mengingatkan agar asesmen nasional pengganti UN dapat disiapkan dengan matang. "Kalau evaluasinya berbasis kompetensi, hendaknya prosesnya juga disiapkan berbasis kompetensi" pesan Maliki.

Menanggapi masukan para anggota Komisi X, Mendikbud menyebut bahwa guru-guru tidak akan dibiarkan sendirian. Pendampingan baik oleh pemerin-

tah pusat, daerah akan dilakukan. Kendati demikian, Kemendikbud juga akan membuka peluang bagi lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta komunitas untuk turut bergotong royong dalam peningkatan kapasitas guru.

Mendikbud juga menyinggung inspirasi program Merdeka Belajar datang dari ajaran Ki Hajar Dewantara. Ia berkeyakinan kalau semua institusi pendidikan diberikan kebebasan, maka perbaikan pendidikan di Indonesia akan lebih cepat terwujud.

"Merdeka belajar itu satu-satunya cara untuk menemukan solusi-solusi permasalahan pendidikan," kata Mendikbud Nadiem.

ANGGARAN TAHUN 2020

Dalam kesempatan yang sama, Mendikbud juga memaparkan rencana anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2020. Menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju ini menyebut masih banyak masyarakat yang salah mengira anggaran di Kemendikbud sebesar Rp500 triliun atau sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kebanyakan dana ini langsung ditransfer ke daerah melalui DAU (dana alokasi umum) dan DAK (dana alokasi khusus). Jadi dari 505 triliun, sekitar 306,9 triliun atau 61 persen, mayoritas, itu merupakan transfer ke daerah dan dana desa," ungkap Mendikbud.

Dijelaskan Mendikbud Nadiem,

dengan kembalinya Pendidikan Tinggi ke dalam Kemendikbud, maka pada tahun 2020 anggaran Kemendikbud yang semula 35,7 triliun, maka akan ditambahkan 39,2 triliun. "Jadi sekitar 2,3 triliun yang akan tersisa di Kemenristek," terangnya.

"Untuk 2020 itu totalnya (yang dikelola Kemendikbud) 75,531 triliun," lanjut Nadiem.

Mendikbud meminta para anggota Komisi X dapat memahami bahwa di dalam anggaran Kemendikbud terdapat dua jenis bantuan sosial pendidikan yang harus dibagikan, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah serta KIP Kuliah untuk jenjang pendidikan tinggi. Keduanya merupakan keharusan untuk memberikan akses pada layanan pendidikan untuk anak-anak yang berasal dari kalangan ekonomi lemah.

Salah satu pendiri Gojek ini juga menjelaskan bahwa alokasi anggaran per bidang yang dipaparkan saat ini masih akan berubah karena menunggu terbitnya Peraturan Presiden mengenai struktur organisasi Kemendikbud yang baru.

Selain itu, Mendikbud juga menekankan urgensi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak di seluruh Indonesia. "Pada 2020 kita akan melakukan sensus untuk mengecek keamanan struktur dari sekolah-sekolah kita," kata Nadiem.■

(www.kemdikbud.go.id)





PPDB 2020 Tetap Sistem Zonasi, Kuota Jalur Prestasi Ditambah

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan tetap menjalankan kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tahun 2020. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyatakan dukungan penuhnya terhadap kebijakan zonasi, namun ia menyadari tidak semua daerah siap menjalankan kebijakan zonasi. Karena itu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan kompromi dari zonasi dengan menambah kuota jalur prestasi menjadi 30 persen (sebelumnya 15 persen), dan mengurangi kuota jalur zonasi menjadi minimal 70 persen (sebelumnya minimal 80 persen).

"Jadi bagi orang tua yang sangat semangat mendorong anaknya untuk mendapatkan angka (nilai) yang baik, prestasi yang baik, ini menjadi kesempatan mereka untuk mencapai sekolah yang diinginkan," ujar Mendikbud Nadiem Makarim dalam Rapat Koordinasi

nasional Mendikbud dengan Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Namun ia menegaskan, kuota zonasi sebesar 70 persen itu tetap harus mengikuti tiga kriteria, yaitu minimum jalur zonasi 50 persen, jalur afirmasi (pemegang Kartu Indonesia Pintar) 15 persen, dan jalur perpindahan 5 persen. Kemudian sisa kuota 30 persen untuk jalur prestasi.

"Ini suatu kompromi di antara aspirasi kita untuk mencapai pemerataan, tapi juga aspirasi orang tua yang ingin anak berprestasinya bisa mendapatkan pilihan di sekolah yang diinginkan," tutur Mendikbud.

Ia mengatakan, Kemendikbud ingin membuat sebuah kebijakan yang bisa melaksanakan esensi semangat zonasi, yaitu pemerataan bagi semua murid untuk bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang baik dengan tetap mengakomodasi perbedaan kondisi di daerah.

Namun Mendikbud menegaskan, zonasi bukan satu-satunya solusi dalam mencapai pemerataan pendidikan. Ada satu lagi kebijakan yang memiliki dampak lebih besar, yaitu pemerataan kuantitas dan kualitas guru. Karena itu ia mengharapkan dukungan dari para kepala dinas pendidikan sebagai perwakilan pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi, setidaknya dari jumlah atau kuantitas guru.

"Kalau ada sekolah-sekolah yang banyak sekali guru berkumpul di sekolah itu, agar dilakukan distribusi yang lebih adil bagi siswa yang sekolahnya kekurangan guru. Kemendikbud tidak bisa melakukan ini tanpa bantuan kepala-kepala dinas pendidikan. Mohon support bapak/ibu agar ini menjadi prioritas nomor satu. Sekolah-sekolah yang kekurangan guru mohon dilakukan distribusi yang baik demi siswa kita," ujarnya. ■

(www.kemdikbud.go.id)

Merdeka Belajar Kunci dalam Pembelajaran Guru dan Murid

Jakarta, Kemendikbud – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim meyakini tujuan pembelajaran yang sesungguhnya hanya dapat tercapai jika guru diberikan kemerdekaan dalam menjalani berbagai tahapan penting di dalamnya, seperti penciptaan kurikulum dan penilaian. Ia juga mengajak semua pihak untuk memberi kepercayaan kepada guru dan kepala sekolah.

“Saya ingin membuktikan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa proses pembelajaran di level apapun membutuhkan interaksi, membutuhkan gotong royong, membutuhkan debat untuk diskusi, dan butuh pemikiran kritis,” ujar Mendikbud. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mendikbud di hadapan para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota saat menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia, di Birawa Assembly Hall, Jakarta, Rabu siang (12/12/2019).

Nadiem menegaskan, agar proses pembelajaran antara guru dan murid dapat berjalan dengan baik di kelas, maka guru harus melalui berbagai tahapan penting untuk mencapai tujuan tersebut. “Yang saya yakini adalah, pertama guru-guru kita mulai melewati proses ini, proses pemikiran, proses reinterpretasi, proses penciptaan kurikulum, dan penilaian sendiri. Kalau guru-guru tidak melewati proses ini, proses pembelajaran di dalam kelas tidak akan terjadi. Ini adalah kuncinya,” tutur Nadiem.

Menteri termuda pada Kabinet Indonesia Maju ini menyadari bahwa akan ada pihak-pihak yang merasa khawatir dengan adanya perubahan tersebut, bahkan, meragukan kesiapan dan kompetensi guru, serta sekolah. Atas keraguan itu ia memiliki jawaban tegas. “Jangan meremehkan guru dan kepala sekolah,” ujarnya. Mendikbud mengajak semua pihak untuk memberi kepercayaan serta

membantu guru dan kepala sekolah melalui proses tersebut.

“Jadi bagi-bagi teman-teman di luar yang sangat tidak pede, tidak yakin bahwa guru-guru dan kepala sekolah tidak bisa menciptakan penilaian sendiri, mohon dibantu. Tapi juga diyakini, bahwa kompetensi levelnya tinggi atau rendah, kalau guru-gurunya tidak melewati proses ini bagaimana murid kita bisa melalui proses pembelajaran,” ujar Nadiem.

Dalam sesi penutupan Rakornas tersebut, Mendikbud menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, yang telah memberikan kepercayaan kepada Kemendikbud untuk melaksanakan program Merdeka Belajar. Selain itu, ia juga mengapresiasi Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI yang telah menampung aspirasi masyarakat, memberikan masukan dan ide, yang turut melahirkan kebijakan ini. ■

(www.kemdikbud.go.id)



MERDEKA BELAJAR

11 Desember 2019



Pokok-pokok Kebijakan Merdeka Belajar

1
Ujian Sekolah
Berstandar
Nasional
(USBN)



2
Ujian
Nasional
(UN)



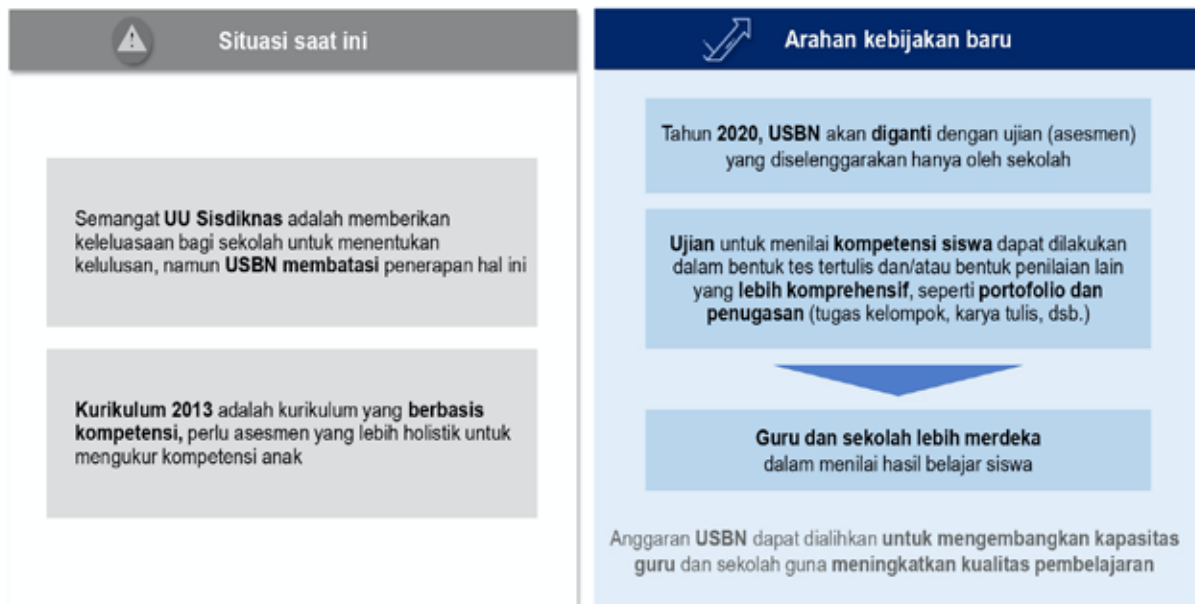
3
Rencana
Pelaksanaan
Pembelajaran
(RPP)



4
Peraturan
Penerimaan
Peserta Didik Baru
(PPDB) Zonasi



1 Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

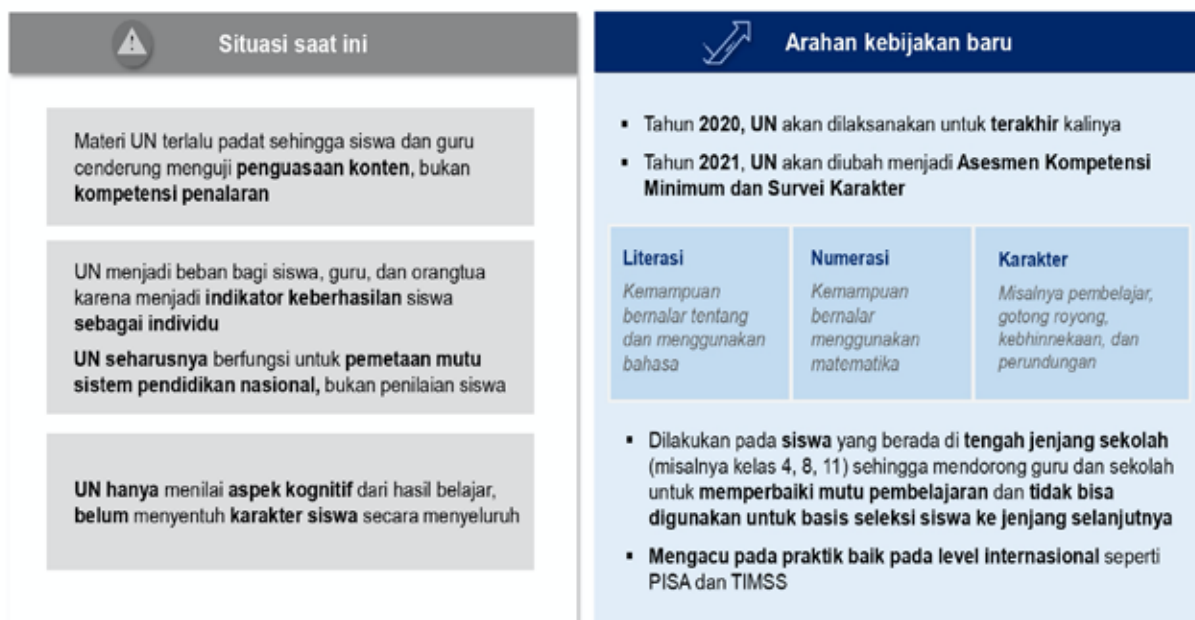


Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2 Ujian Nasional (UN)



Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

3 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

	 Situasi saat ini	 Arahan kebijakan baru
Format	Guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku	Guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP
Komponen	RPP memiliki terlalu banyak komponen – Guru diminta untuk menulis dengan sangat rinci (satu dokumen RPP bisa mencapai lebih dari 20 halaman)	3 komponen inti (<i>komponen lainnya bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri</i>): ▪ Tujuan pembelajaran ▪ Kegiatan pembelajaran ▪ Asesmen 1 halaman cukup
Durasi Penulisan	Penulisan RPP menghabiskan banyak waktu guru , yang seharusnya bisa digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri	Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri

Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

4 Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi

	 Situasi saat ini	 Arahan kebijakan baru
Rancangan Peraturan	Tujuan peraturan PPDB zonasi: ▪ Memberikan akses pendidikan berkualitas ▪ Mewujudkan Tripusat Pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat) dengan bersekolah di lingkungan tempat tinggal Pembagian zonasi: ▪ Jalur zonasi: minimal 80% ▪ Jalur prestasi: maksimal 15% ▪ Jalur perpindahan: maksimal 5%	Membuat kebijakan PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah: ▪ Jalur zonasi: minimal 50% ▪ Jalur afirmasi: minimal 15% ▪ Jalur perpindahan: maksimal 5% ▪ Jalur prestasi (sisanya 0-30%, disesuaikan dengan kondisi daerah)
Implementasi	▪ Peraturan terkait PPDB kurang mengakomodir perbedaan situasi daerah ▪ Belum terimplementasi dengan lancar di semua daerah ▪ Belum disertai dengan pemerataan jumlah guru	▪ Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi ▪ Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru

Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENYEDERHANAAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/kota di seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pelaksanaan Kurikulum 2013, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid.
2. Bahwa dari 13 (tiga belas) komponen RPP yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah (kegiatan) pembelajaran, dan penilaian pembelajaran (assessment) yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap.
3. Sekolah, kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah, Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (KKG/MGMP), dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar murid.
4. Adapun RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 10 Desember 2019

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia,

Nadiem Anwar Makarim



Tembusan:

1. Gubernur di seluruh Indonesia; dan
2. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

Tentang Kebijakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

Mengapa pemerintah mengganti USBN?	USBN dikembalikan pada esensinya, yaitu asesmen akhir jenjang yang dilakukan oleh guru dan sekolah. Kelulusan siswa pada akhir jenjang memang merupakan wewenang sekolah yang didasarkan pada penilaian oleh guru. Hal ini sesuai dengan UU Sisdiknas dan juga prinsip pendidikan bahwa yang paling memahami siswa adalah guru. Selain itu, asesmen akhir jenjang oleh sekolah memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif, yang tidak hanya didasarkan pada tes tertulis pada akhir tahun. Hal ini juga mendorong sekolah untuk mengintensifkan dan memperluas pelibatan guru dalam semua tingkat dalam proses asesmen.
Apa ganti USBN?	Gantinya adalah ujian yang dikelola tiap-tiap sekolah. Ujian tersebut dapat dilaksanakan dalam beragam bentuk asesmen sesuai dengan kompetensi yang diukur.
Seperti apa pelaksanaan ujian sekolah pengganti USBN?	Dari sisi <u>bentuk</u> ujian, guru boleh dan diharapkan menggunakan beragam bentuk asesmen. Hal ini bisa berupa tes tertulis seperti saat ini. Namun guru juga disarankan menggunakan asesmen bentuk lain seperti penugasan, portofolio siswa, dan <i>project</i> kolaboratif. Dari sisi <u>waktu</u> pelaksanaan, asesmen yang menjadi bagian dari ujian ini tidak selalu harus dilakukan di penghujung tahun ajaran sebagaimana ujian konvensional selama ini. Misalnya, nilai ujian akhir jenjang bisa didasarkan pada penilaian portofolio dan penugasan yang dilakukan sejak semester ganjil. Kedua perubahan ini memungkinkan kompetensi siswa dinilai secara lebih komprehensif. Perubahan ini juga memungkinkan penilaian yang lebih terdiferensiasi, sesuai dengan kebutuhan individual siswa.
Bagaimana jika guru merasa kurang siap melakukan penilaian akhir jenjang?	USBN memposisikan sebagian besar guru sebagai penerima dan pengguna tes yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di bawah koordinasi dinas pendidikan daerah. Semua siswa dan semua sekolah dalam satu daerah terikat untuk menggunakan bentuk ujian sama. Hal ini menghambat kemerdekaan guru untuk belajar melakukan asesmen. Dengan mengembalikan kewenangan penilaian akhir jenjang pada sekolah, guru didorong untuk mulai dan secara terus menerus mengembangkan kapasitas profesionalnya terkait asesmen. Selain itu, membuat soal tes tertulis yang bermutu memang tidak mudah. Kabar baiknya, penilaian akhir jenjang tidak harus mengandalkan tes tertulis. Guru bisa menggunakan beragam bentuk asesmen yang sesuai dengan kompetensi yang diukur, termasuk bentuk asesmen yang lebih dikenal oleh masing-masing guru.
Apa peran yang diharapkan dari dinas pendidikan?	Dinas Pendidikan tidak lagi mengkoordinasi atau memfasilitasi penyelenggaraan ujian yang seragam. Peran Dinas diharapkan bergeser ke arah pengembangan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan mutu pembelajaran.
Apa konsekuensi kebijakan baru ini pada guru?	Guru menjadi lebih merdeka dalam mengajar dan melakukan asesmen siswa. Guru dapat melakukan asesmen yang lebih sesuai untuk kebutuhan siswa dan situasi kelas/sekolahnya. Hal ini juga mendorong guru untuk terus mengembangkan kompetensi profesionalnya, terutama terkait asesmen siswa.
Apa konsekuensi kebijakan baru ini bagi sekolah?	Sekolah perlu mendukung praktik asesmen yang baik, yakni asesmen yang berdampak positif pada proses dan hasil belajar siswa. Hal ini bisa dilakukan dengan memfasilitasi guru untuk berkolaborasi mengenai strategi asesmen yang tepat bagi siswa dan kondisi sekolah masing-masing.
Apa konsekuensi kebijakan baru ini bagi siswa?	Tekanan psikologis bagi siswa akan berkurang karena asesmen dapat dilakukan secara lebih komprehensif, tidak hanya pada waktu spesifik di akhir tahun ajaran seperti praktik selama ini. Siswa bisa memiliki lebih banyak kesempatan, dan melalui lebih banyak cara, untuk menunjukkan kompetensinya.



Tentang Kebijakan Ujian Nasional (UN)

Apa kebijakan baru tentang UN?	Mulai tahun 2021 UN akan diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Kedua asesmen baru ini dirancang khusus untuk fungsi pemetaan dan perbaikan mutu pendidikan secara nasional.
Mengapa 2020 akan menjadi tahun terakhir bagi UN?	Pertama, UN lebih banyak berisi butir-butir yang mengukur kompetensi berpikir tingkat rendah. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang lebih relevan dengan Abad 21, sebagaimana tercermin pada Kurikulum 2013. Kedua, UN kurang mendorong guru menggunakan metode pengajaran yang efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Asesmen kompetensi pengganti UN akan dirancang memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan penalaran, bukan hafalan. Ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk memperbaiki mutu pendidikan secara nasional. Karena dilangsungkan di akhir jenjang, hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dan memberi bantuan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut.
Apa akan mengganti UN?	Asesmen kompetensi pengganti UN mengukur kompetensi bernalar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah di berbagai konteks, baik personal maupun profesional (pekerjaan). Saat ini kompetensi apa saja yang akan diukur masih dikaji, namun contohnya adalah kompetensi bernalar tentang teks (literasi) dan angka (numerasi). Selain itu, Kemdikbud juga akan melakukan survei untuk mengukur aspek-aspek lain yang mencerminkan penerapan Pancasila di sekolah. Hal ini mencakup aspek-aspek karakter siswa (seperti karakter pembelajar dan karakter gotong royong) dan iklim sekolah (misalnya iklim kebinekaan, perilaku <i>bullying</i> , dan kualitas pembelajaran). Karena fungsi utamanya adalah sebagai alat pemetaan mutu, asesmen kompetensi dan survei pembinaan Pancasila ini belum tentu dilaksanakan setiap tahun, dan belum tentu harus diikuti oleh semua siswa.
Tanpa UN, bukankah siswa kurang termotivasi untuk belajar?	Menggunakan ancaman ujian untuk mendorong belajar akan berdampak negatif pada karakter siswa. Jika dilakukan terus menerus, siswa justru akan menjadi malas belajar jika tidak ada ujian. Dengan kata lain, siswa menjadi terbiasa belajar sekedar untuk mendapat nilai baik dan menghindari nilai jelek. Hal ini membuat siswa lupa akan kenikmatan intrinsik yang bisa diperoleh dari proses belajar itu sendiri. Padahal, motivasi belajar intrinsik inilah yang justru sangat perlu dikembangkan agar siswa agar menjadi pembelajar sepanjang hayat.
Tanpa UN, apakah siswa tidak menjadi orang yang kurang gigih?	UN adalah alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi mutu sistem pendidikan. Fungsi UN bukan untuk melatih keuletan atau kegigihan. Sifat-sifat ini tidak dapat dibentuk secara instan di akhir jenjang pendidikan melalui ancaman ketidakkululusan atau nilai buruk. Sifat seperti kegigihan hanya dapat ditumbuhkan melalui proses belajar yang memberi berbagai tantangan bermakna secara berkelanjutan. Butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa membuat sifat seperti kegigihan menjadi bagian dari karakter siswa.
Mengapa hanya difokuskan pada literasi dan numerasi?	Literasi dan numerasi adalah kompetensi yang sifatnya general dan mendasar. Kemampuan berpikir tentang, dan dengan, bahasa serta matematika diperlukan dalam berbagai konteks, baik personal, sosial, maupun profesional. Dengan mengukur kompetensi yang bersifat mendasar (bukan konten kurikulum atau pelajaran), pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa guru diharapkan berinovasi mengembangkan kompetensi siswa melalui berbagai pelajaran melalui pengajaran yang berpusat pada siswa.
Apakah berarti pelajaran selain bahasa dan matematika tidak penting?	Fokus asesmen adalah kompetensi berpikir, sehingga hasil pengukuran tidak sekedar mencerminkan prestasi akademik pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika saja. Literasi dan numerasi justru bisa dan seharusnya memang dikembangkan melalui berbagai mata pelajaran, termasuk IPA, IPS, kewarganegaraan, agama, seni, dst. Pesan ini penting dipahami oleh guru, sekolah, dan siswa untuk meminimalkan risiko penyempitan kurikulum pada pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika.
Jika apa yang diukur tidak terikat pada konten kurikulum, bagaimana kaitan antara asesmen ini dengan standar pendidikan?	Betul bahwa asesmen ini tidak terikat secara erat dengan konten kurikulum. Namun tidak berarti bahwa asesmen ini sama sekali terlepas dari kurikulum. Dari sisi konten, asesmen literasi dan numerasi tentu memperhatikan apa yang (seharusnya) diajarkan oleh guru pada tiap kelas dan jenjang pendidikan. Hanya saja, asesmen ini tidak dimaksudkan untuk mengukur penguasaan siswa atas konten kurikulum secara keseluruhan. Pada prinsipnya, penguasaan kurikulum secara utuh hanya bisa dinilai oleh guru menggunakan sumber informasi yang beragam dari interaksi sehari-hari dengan siswa. Terlebih lagi, kurikulum tiap sekolah bisa berbeda karena masing-masing memiliki kewenangan untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan visi dan karakteristik siswanya.

Siapa yang akan menjadi peserta asesmen pengganti UN?	Asesmen kompetensi baru akan dilakukan pada siswa yang duduk di pertengahan jenjang sekolah, seperti kelas 4 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA. Dengan dilakukan pada tengah jenjang, hasil asesmen bisa dimanfaatkan sekolah untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Dengan dilakukan sejak jenjang SD, hasilnya dapat menjadi deteksi dini bagi permasalahan mutu pendidikan nasional.
Apakah perubahan ini berdampak pada siswa SD?	Perlu diketahui bahwa saat ini pun tidak ada UN pada jenjang SD. Dengan demikian, penghentian UN tidak berdampak pada siswa SD. Seperti yang dipaparkan pada poin sebelumnya, sebagian siswa SD akan mengikuti asesmen kompetensi baru. Namun asesmen baru ini dirancang agar tidak memiliki konsekuensi bagi siswa. Karena itu, asesmen baru tidak menjadi beban tambahan bagi siswa SD.
Tanpa UN, bagaimana mengukur ketercapaian standar nasional pendidikan?	Perlu dipahami bahwa UN itu sendiri bukan merupakan standar. UN merupakan instrumen asesmen yang membantu menilai pencapaian sebagian standar nasional pendidikan. Karena itu, menghapus UN bukan berarti menghilangkan standar pendidikan. Sebagaimana disebutkan di atas, UN akan diganti dengan asesmen lain yang memang dirancang sebagai alat pemetaan mutu pendidikan nasional. Hasil asesmen pengganti UN tersebut akan menjadi indikator bagi ketercapaian standar nasional pendidikan di tiap daerah.
Jika tidak terikat pada konten kurikulum, apakah asesmen ini akan menjadi tambahan beban bagi siswa/guru di luar kurikulum yang ada?	Asesmen yang dilakukan oleh otoritas (dalam hal ini Kemendikbud) berpotensi dipandang sebagai beban tambahan karena guru dan sekolah ingin memperoleh hasil yang baik. Meski demikian, sebenarnya asesmen literasi dan numerasi ini bukan beban tambahan. Yang diukur oleh asesmen ini bukanlah penguasaan konten tambahan yang perlu diajarkan di luar kurikulum yang ada. Seperti telah disebutkan sebelumnya, kompetensi literasi dan numerasi bisa dan perlu dikembangkan melalui semua mata pelajaran.
Jika digunakan untuk menilai efektivitas sekolah, apakah asesmen baru tidak berdampak negatif pada siswa?	Harus diakui bahwa asesmen baru dapat dianggap bersifat <i>high stakes</i> bagi guru dan sekolah. Jika itu terjadi, asesmen baru berpotensi memiliki dampak negatif seperti mendorong adanya tekanan dari guru pada siswa untuk mendapat skor tinggi, serta anggapan bahwa pelajaran yang dianggap tidak relevan untuk asesmen ini kurang penting. Dampak seperti ini akan dimitigasi melalui berbagai cara. Yang pertama adalah rancangan kebijakan yang menekankan pada pemberian dukungan dan sumberdaya sesuai kebutuhan sekolah, bukan hukuman dan hadiah. Kedua, akan tersedia asesmen yang sama dalam versi yang dapat digunakan oleh guru sebagai bagian dari pengajaran sehari-hari. Versi “asesmen mandiri” ini juga akan dilengkapi dengan petunjuk pedagogis dan sumberdaya belajar yang relevan untuk mengembangkan kompetensi siswa sesuai levelnya.
Apa dampak asesmen baru bagi siswa?	Asesmen kompetensi pengganti UN akan dirancang agar tidak memiliki konsekuensi bagi siswa. Misalnya, pelaksanaan pada pertengahan jenjang (bukan akhir jenjang) membuat hasil asesmen kompetensi tidak relevan untuk menilai pencapaian siswa. Hasilnya juga tidak relevan untuk seleksi memasuki jenjang sekolah yang lebih tinggi. Dengan demikian, asesmen ini tidak akan menjadi beban tambahan bagi siswa, di luar beban belajar normal yang sudah dijalani.
Apa dampak asesmen pada guru dan sekolah?	Analisis dan laporan hasil asesmen kompetensi akan dibuat agar bisa dimanfaatkan guru dan sekolah untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Hal ini dimungkinkan karena asesmen baru akan didasarkan pada model <i>learning progression</i> (lintasan belajar) yang akan menunjukkan posisi siswa dalam tahapan perkembangan suatu kompetensi. Laporan hasil asesmen juga akan dirancang agar tidak menjadi ancaman bagi guru dan sekolah. Pemerintah menyadari bahwa baik buruknya pencapaian siswa dipengaruhi oleh faktor pengajaran (proses di sekolah) maupun faktor-faktor di luar sekolah, seperti lingkungan rumah dan gaya pengasuhan orangtua. Karena itu keberhasilan guru atau sekolah tidak akan dinilai berdasarkan level kompetensi siswa di satu waktu. Keberhasilan guru/sekolah akan lebih didasarkan pada perubahan dan kemajuan yang dicapai dibanding waktu asesmen sebelumnya. Hasil asesmen justru akan digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan sekolah. Kemdikbud akan mengalokasikan dukungan – misalnya dalam bentuk alokasi SDM dan/atau dana – sesuai dengan kebutuhan tiap sekolah.
Apa dasar hukum penggantian UN dengan asesmen baru?	UU Sisdiknas secara eksplisit memberi mandat kepada pemerintah – melalui lembaga mandiri – untuk melakukan evaluasi mutu sistem pendidikan nasional. Asesmen pengganti UN akan menjadi instrumen untuk melayani fungsi tersebut. Selain itu, pengadilan Negeri Jakarta pada 2007, dan kemudian Mahkamah Agung (MA) pada 2009, menilai bahwa UN tidak adil bagi siswa yang berada di sekolah dan/atau daerah yang kekurangan sumberdaya. MA memerintahkan pemerintah untuk “meninjau kembali sistem pendidikan nasional”. Dengan merancang asesmen baru yang berfungsi untuk pemetaan mutu serta umpan balik bagi sekolah, tanpa ada konsekuensi pada siswa, pemerintah secara otomatis telah mematuhi putusan hukum MA mengenai UN.

Tentang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Apa yang menjadi pertimbangan penyederhanaan RPP?	Guru-guru sering diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat rinci sehingga banyak menghabiskan waktu yang seharusnya bisa lebih difokuskan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri.
Apa yang dimaksud dengan prinsip efisien, efektif dan berorientasi pada murid?	• Efisien berarti penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. • Efektif berarti penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. • Berorientasi pada murid berarti penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar murid di kelas.
Apakah RPP dapat dibuat dengan singkat, misalnya hanya satu halaman?	Bisa saja, asalkan sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi kepada murid. Tidak ada persyaratan jumlah halaman.
Apakah ada standar baku untuk format penulisan RPP?	Tidak ada. Guru bebas membuat, memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid.
Bagaimana dengan format RPP yang sudah dibuat guru?	• Guru dapat tetap menggunakan format RPP yang telah dibuatnya. • Guru dapat pula memodifikasi format RPP yang sudah dibuat sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi kepada murid.
Berapa jumlah komponen dalam RPP?	• Ada 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, langkah- langkah pembelajaran (kegiatan), dan penilaian pembelajaran (asesmen). Komponen-komponen lainnya adalah pelengkap. • Tujuan pembelajaran ditulis dengan merujuk kepada kurikulum dan kebutuhan belajar murid. Kegiatan belajar dan asesmen dalam RPP ditulis secara efisien.



Tentang Kebijakan Zonasi Tahun Ajaran 2020/2021 Perubahan Aturan

Apa perubahan yang paling nyata dari peraturan yang baru?

Dalam Permendikbud terbaru terkait PPDB, Pemerintah Pusat memberikan fleksibilitas daerah dalam menentukan alokasi untuk siswa masuk ke Sekolah melalui jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orangtua/wali, atau jalur lainnya (dapat berupa jalur prestasi). Persentasenya pun berubah menjadi sebagai berikut:

PERMENDIKBUD PPDB SEBELUMNYA (PERMENDIKBUD NO. 51 TAHUN 2018 JO PERMENDIKBUD NO. 20 TAHUN 2019)	PERMENDIKBUD PPDB TERBARU (PERMENDIKBUD NO. 44 TAHUN 2019)
- Jalur zonasi minimal 80% - Jalur prestasi maksimal 15% - Jalur perpindahan orangtua/wali maksimal 5%	- Jalur zonasi minimal 50% - Jalur afirmasi minimal 15% - Jalur perpindahan orangtua/wali maksimal 5% - Jika ada sisa kuota, jalur prestasi dapat dibuka, bisa berdasarkan UN ataupun prestasi akademik dan non- akademik lainnya. Jalur ini, dengan demikian, maksimal 30%

Aturan PPDB ini dirancang agar daerah bisa menyesuaikan aturan berdasarkan karakteristik dan kebutuhannya. Itulah mengapa jalur zonasi dan afirmasi ini secara eksplisit disebutkan proporsi minimal untuk memudahkan daerah dengan tetap dan atau menambah persentase jalur prestasi tersebut jika dibutuhkan.

Setelah menentukan kuota jalur Zonasi, kuota jalur afirmasi, dan seterusnya, daerah secara transparan harus menjelaskan ketentuan PPDB masing-masing kepada masyarakat, terutama pemangku kepentingan yang berkaitan dengan ketentuan ini. Pemerintah Daerah juga sebaiknya menjelaskan kepada publik latar belakang penetapan proporsi dari masing-masing jalur tersebut, sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi kepada publik.

Dinas Pendidikan juga diminta untuk melaporkan ketentuan yang dibuat serta pelaksanaan PPDB kepada Kemendikbud, agar bisa dilakukan monitor dan evaluasi pelaksanaan Permendikbud.

Mengapa perlu perubahan Permendikbud terkait PPDB?

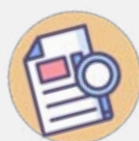
Perubahan ini dilakukan setelah mempelajari beragam implementasi PPDB pada tahun-tahun sebelumnya di tingkat Pemerintah daerah. Meskipun Permendikbud PPDB yang terdahulu (Permendikbud No 51 Tahun 2018 dan Permendikbud No 20 Tahun 2019) telah menetapkan secara tegas terkait persentase tiap jalur, namun dalam penerapannya Pemerintah Daerah membuat ketentuan PPDB utamanya pada jalur zonasi dengan mekanisme yang berbeda-beda, bahkan tidak sesuai dengan persentase minimal pada ketentuan PPDB sebelumnya.

Hal ini mengindikasikan perlunya tinjauan ulang dalam membuat ketentuan yang agar dapat diterapkan daerah sesuai dengan kebutuhannya, dengan catatan daerah terus meningkatkan akses dan mutu pendidikan agar seluruh anak dapat belajar di sekolah yang bermutu.

Bagaimana dengan daerah yang sudah menerapkan ketentuan Jalur Zonasi sebesar 80% sesuai dengan Permendikbud PPDB sebelumnya (Permendikbud No 51 Tahun 2018, Permendikbud No 20 Tahun 2019)?

Permendikbud PPDB yang baru ini tidak akan membuat ketentuan daerah yang sudah menerapkan jalur zonasi sebanyak 80% dengan tertib menjadi sia-sia. Pemerintah Pusat memberikan batas minimal 50% untuk setiap jalur penerimaan peserta didik baru, yang artinya Daerah yang sudah menerapkan jalur zonasi sebanyak 80%, selanjutnya tinggal mengimplementasikan jalur lainnya sesuai dengan ketentuan Permendikbud terbaru tersebut.

Contoh penetapan jalur yang benar dan yang salah:

PENENTUAN PERSENTASE JALUR PPDB YANG BENAR	PENENTUAN PERSENTASE JALUR PPDB YANG SALAH
KABUPATEN A - Jalur zonasi 50% - Jalur afirmasi 15% - Jalur perpindahan orangtua/wali 5% - Jalur prestasi 30%	 KABUPATEN D - Jalur zonasi 40% menyalahi aturan minimal 50% - Jalur afirmasi 15% - Jalur perpindahan orangtua/wali 5% - Jalur prestasi 40% 
KABUPATEN B - Jalur zonasi 80% - Jalur afirmasi 15% - Jalur perpindahan orangtua/wali 5% Catatan: Pemda tidak menetapkan jalur prestasi karena sudah cukup dimasukkan kedalam jalur zonasi (jalur prestasi dalam Permendikbud disebutkan kata sisanya, tidak ada ketentuan minimal, artinya tidak wajib dilaksanakan jika dapat disalurkan kepada jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan)	
KABUPATEN C - Jalur zonasi 65% - Jalur afirmasi 20% - Jalur perpindahan orangtua/wali 5% - Jalur prestasi (berupa jalur prestasi) 10%	

Jika yang bermasalah dalam mengatur PPDB adalah Pemerintah Daerah, mengapa Pemerintah Pusat perlu mengganti aturan?

Pemerintah Pusat tidak bisa menyeragamkan pengelolaan PPDB ini. Fungsi Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah sebagai fasilitator, bukan sebagai regulator yang tidak memperhatikan kondisi dan kebutuhan di daerah. Pemerintah Pusat memfasilitasi Daerah untuk mengelola sistem pendidikan agar setiap anak di daerah tersebut dapat mengakses pendidikan bermutu, dan sistemnya lebih berkeadilan sosial.

Dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan PPDB di daerah, ditemukan bahwa Pemerintah Daerah kesulitan melakukan pemetaan jumlah usia anak sekolah yang sedang mengikuti PPDB dan jumlah daya tampung yang tersedia di Sekolah, sehingga dalam penerapannya cukup sulit dilaksanakan PPDB dengan jalur zonasi dengan persentase yang cukup besar.

Oleh karena itu, Pemerintah Pusat sangat mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah mampu menghitung dan memenuhi daya tampung serta mutu yang baik merata di seluruh Sekolah. Oleh karena itu Pemerintah Pusat memberikan aturan yang lebih fleksibel kali ini, sembari mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan dengan data yang tepat, meningkatkan akses melalui daya tampung Sekolah yang mencukupi, dan meningkatkan mutu pendidikan di setiap Sekolah agar kualitas pendidikan yang tinggi dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia.

Mengapa Pemerintah Pusat menyarankan pelibatan sekolah swasta?

Data yang dikeluarkan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) menunjukkan bahwa jumlah sekolah negeri pada jenjang SMP lebih sedikit dibandingkan SMA, bahkan lebih dari 60% SMA adalah sekolah swasta. Membangun sekolah negeri baru untuk meningkatkan akses pendidikan bukan langkah yang ekonomis untuk dilakukan dalam waktu dekat.

Setiap tahunnya, siswa yang lulus dan siap masuk SMA, tanpa menunggu proses pembangunan gedung sekolah. Rencana menambah jumlah sekolah negeri adalah rencana yang baik dan patut dilakukan pemerintah daerah. Namun selama ini sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berbiaya rendah juga sangat berperan dalam membuka akses pendidikan, sehingga kemitraan dengan Dinas Pendidikan akan menjadi solusi yang baik bagi kedua belah pihak.

Dalam upaya pelibatan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah sebaiknya mempertimbangkan kualitas layanan di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, sebelum Pemerintah Daerah melibatkan sekolah tersebut dalam skema PPDB.

Apa yang diharapkan Pemerintah Pusat dari Pemerintah Daerah, terkait dengan PPDB dan akses pendidikan?

Dalam pelaksanaan PPDB melalui Jalur Zonasi yang sudah dilaksanakan sebelumnya, data menunjukkan bahwa jumlah daya tampung Sekolah Negeri tidak cukup untuk menerima seluruh siswa yang mendaftar pada Sekolah jenjang berikutnya melalui PPDB. Hal ini mendorong daerah memberikan intervensi dalam pemenuhan layanan pendidikan di daerahnya, karena pada dasarnya Pendidikan adalah Layanan Dasar sebagaimana ketentuan dalam UU Pemerintahan Daerah.

Memenuhi hak akses pendidikan perlu menjadi prioritas, namun perlu disadari bahwa membangun Unit Sekolah Negeri Baru memerlukan langkah yang cukup panjang dengan membutuhkan pembebasan lahan, durasi pembangunan yang lama, dan adanya keterbatasan anggaran negara. Sekolah Swasta dapat menjadi alternatif dalam pemenuhan daya tampung, juga sebagai bentuk

kolaborasi antara Pemerintah dengan masyarakat. Kolaborasi ini dapat diupayakan sembari pemenuhan pendidikan utamanya bagi yang tidak mampu dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, dapat berupa subsidi biaya, bantuan operasional, maupun mekanisme lainnya.

Mengapa tidak menyerahkan sepenuhnya saja kepada Daerah untuk mengelola PPDB?

PPDB jalur Zonasi yang diatur dalam Permendikbud yang baru bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Selain itu, pendidikan yang bermutu adalah hak setiap anak Indonesia yang harus dipenuhi Pemerintah. Artinya, kualitas pendidikan harus merata.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa tujuan ini dapat dicapai, Pemerintah Pusat mengatur beberapa aturan dan batasan, yaitu dengan adanya jalur zonasi dan jalur afirmasi yang memiliki batasan minimal serta jalur perpindahan orang tua yang memiliki batasan maksimal untuk setiap jalur penerimaan peserta didik, dan apabila masih ada sisa dapat digunakan untuk jalur prestasi.

Mengapa Pemerintah Daerah perlu melaporkan aturan dan hasil Pelaksanaan PPDB kepada Pemerintah Pusat?

Pelaksanaan PPDB yang dilakukan Pemerintah Daerah penting untuk dilaporkan kepada Pemerintah Pusat, hal ini dikarenakan segala kebijakan PPDB yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah adalah data bagi Pemerintah Pusat untuk memahami mekanisme pemenuhan akses pendidikan di daerah, dengan tantangan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Melalui PPDB ini pun dapat dipetakan data pemenuhan akses anak terhadap pendidikan. Hal ini juga memudahkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan keputusan ketika menghadapi tantangan yang ada di sekolah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Terkait dengan pengumuman kebijakan PPDB, apakah informasi ini perlu disampaikan juga kepada warga masyarakat walaupun mereka tidak berkepentingan secara langsung dengan penerimaan siswa baru?

Ya, pendidikan adalah tanggung jawab bersama, dan perlu menjadi perhatian seluruh warga masyarakat, tidak hanya orangtua yang mendaftarkan anaknya sekolah saja. Kepedulian masyarakat dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan pemerataan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.



Tentang Proporsi Jalur PPDB

Mengapa menggunakan batas minimum untuk jalur zonasi dan jalur afirmasi?	PPDB adalah suatu proses yang sangat perlu memperhatikan konteks lokal, misalnya berapa banyak sekolah negeri di suatu wilayah, berapa banyak anak usia SD yang akan melanjutkan ke SMP, serta dari SMP ke SMA, berapa banyak anak penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di daerah tersebut, berapa banyak yang kondisi ruang kelasnya rusak, dan sebagainya. Akan lebih efisien, sesuai konteks, dan tepat sasaran apabila masing-masing Daerah yang mengatur regulasi PPDB yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Hal ini juga selaras dengan semangat otonomi daerah, Pemerintah Pusat memberikan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah sebagai rambu-rambu yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.
Apa yang dimaksud dengan jalur afirmasi?	Jalur afirmasi disediakan untuk siswa yang menerima program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (misalnya penerima KIP). Jalur ini merupakan komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan layanan akses pendidikan berkualitas untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Pemerintah Daerah dapat menentukan proporsi siswa yang diterima melalui jalur ini dengan mengacu pada persentase siswa yang menerima program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah di daerah tersebut.
Jika ada calon peserta didik penerima KIP namun secara domisili peserta didik yang bersangkutan juga bisa masuk melalui jalur zonasi, jalur mana yang akan diikutinya?	Jalur afirmasi, jika kuota afirmasi belum terpenuhi untuk sekolah tersebut. Hal ini dilakukan agar siswa dalam zona yang tidak menerima program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tidak terhalangi untuk masuk ke sekolah tersebut. Dengan demikian, kesempatan yang diberikan pemerintah pada siswa dari keluarga tidak mampu sedapat mungkin tidak merugikan siswa dari kelas sosial lainnya.
Persentase minimum untuk jalur zonasi hanya 50%, ini lebih kecil daripada proporsi di Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana diubah dengan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Apa pertimbangan Pemerintah Pusat tentang hal ini?	Ada dua alasan utama terkait hal ini. Pertama, Pemerintah Pusat mendengar beberapa masukan dari Pemerintah Daerah untuk mencapai jalur zonasi dengan batas minimum 80% mengalami kesulitan. Karena khawatir tidak mencapai angka tersebut, satuan zona diperbesar. Bahkan wilayah satu kota menjadi satu zona, tidak dibagi menjadi beberapa zona karena khawatir ada sekolah yang tidak mendapatkan siswa. Jika satu zona sudah sebesar wilayah administrasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, maka esensi dari PPDB melalui jalur zonasi ini menjadi tidak jelas. Dengan adanya aturan yang tidak seketat dahulu, diharapkan Daerah lebih optimis bahwa tujuan PPDB melalui jalur zonasi ini dapat diwujudkan. Kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah masalah kondisi sekolah di Indonesia yang masih belum merata kualitasnya. Demikian pula penyebaran guru yang berkualitas tinggi juga masih belum merata. Menurut data terakhir Kemendikbud, ruang kelas yang kondisinya tergolong baik tidak mencapai 50% di seluruh Indonesia. Artinya lebih banyak ruang kelas yang rusak dibandingkan yang baik. Pemerintah Daerah perlu melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tentang masalah ini, begitu juga dengan akses pendidikan yang semakin sulit dicapai anak-anak miskin di jenjang yang lebih tinggi. Namun demikian, Pemerintah Daerah pasti perlu waktu untuk memperbaiki kondisi ruang kelas dan pendistribusian guru berkualitas, disisi lain siswa lulus dari sekolah setiap tahun tanpa henti, tidak bisa menunggu ruang kelas direnovasi atau guru berkualitas dirotasi. Maka jangan sampai kebijakan untuk pemerataan pendidikan mengorbankan anak.
Apakah penurunan % siswa yang masuk melalui sistem zonasi ini menandakan bahwa Pemerintah kurang berpihak pada anak-anak miskin yang biasanya hanya jadi "penonton" sekolah "favorit" di lingkungannya?	Pemerintah terus berkomitmen pada pemerataan kualitas pendidikan, namun jangan sampai kebijakan tersebut mengorbankan anak. Asumsi bahwa dengan dibatasi wilayah maka anak miskin dapat mengakses pendidikan berkualitas juga belum tentu berlaku di semua wilayah. Tidak mustahil dengan adanya zonasi yang ketat anak-anak dari keluarga miskin yang berpotensi tinggi justru "terjebak" untuk masuk sekolah yang ada di dekat rumahnya, yang sebenarnya kualitasnya kurang baik. Namun ini semua masih berlandaskan asumsi, kita perlu data empiris dan analisis yang lebih sistematis untuk memastikan bahwa aturan PPDB tidak merugikan kelompok tertentu. Kedua, secara eksplisit ada jalur afirmasi yang disyaratkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan komitmen pada pemerataan kesempatan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Apakah penurunan % zonasi ini menandakan bahwa "sekolah favorit" akan dipertahankan?	Tidak, pertimbangan tentang batas minimum jalur zonasi dan jalur afirmasi tidak ada hubungannya dengan favoritisme. Sebelum kebijakan zonasi diterapkan, kita tidak bisa benar-benar mengatakan bahwa ada sekolah unggulan karena yang unggul adalah input siswanya. Mereka sudah tersaring ketat, sehingga di suatu sekolah yang mendapat label "unggulan" atau "favorit" ini siswanya cenderung homogen, yaitu mayoritas siswa dengan capaian akademik yang tinggi. Karena umumnya mereka dari keluarga kelas menengah sampai dengan kelas atas, dukungan belajar di luar sekolah untuk anak-anak ini juga lebih baik, misalnya ikut Bimbingan Belajar, kursus bahasa asing, dan sebagainya. Sehingga output dari sekolah itu pun menjadi unggulan. Kita ingin semua sekolah unggul, sama baiknya. Setiap anak mendapat kesempatan belajar di ruang kelas yang baik kondisinya dan diajar oleh guru yang kompeten. Sebelum kebijakan zonasi diterapkan, hanya siswa tertentu saja yang berkesempatan demikian. Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, tidak boleh membuat aturan yang mendiskriminasi kelompok tertentu.

Mengapa jalur prestasi disediakan maksimal 30% saja?	Kembali ke tujuan besar dari PPDB adalah untuk pemerataan kesempatan pendidikan, di mana akses terbuka untuk semua anak, maka jalur prestasi yang terlalu besar bisa menjauhkan kita dari tujuan tersebut. Daerah tidak harus membuka jalur ini, karena mungkin akses sekolah sudah sangat besar dari segi suplai, maka semua anak dalam zona sudah bisa tertampung.
---	--

Tentang Satuan wilayah zonasi

Apakah ada perubahan peraturan terkait penghitungan satuan wilayah zonasi?	Pemerintah Daerah perlu menetapkan satuan wilayah zonasi, seberapa luasnya serta berapa banyak wilayah zonasi yang ada di wilayah administrasinya. Hal ini dilakukan dengan cara memetakan jumlah dan domisili calon peserta didik baru, daya tampung sekolah, dan jumlah sekolah yang diselenggarakan masyarakat yang akan disertakan dan sekolah yang berbasis agama. Data ini seharusnya ada di tingkat daerah.
Ada kasus di mana anak tinggal di wilayah perbatasan, harus masuk ke sekolah yang lebih jauh karena masuk dalam zonanya. Padahal lebih dekat jika bersekolah di zona yang berbeda. Kasus ini sudah ada jalan keluarnya?	Ini adalah hal yang perlu diperhitungkan Pemerintah Daerah ketika membuat zona. Harusnya kasus seperti ini tidak banyak, karena jika banyak artinya metode penetapan zonanya keliru. Oleh karena tidak banyak, hal-hal seperti ini seharusnya bisa diselesaikan Pemerintah Daerah, melalui musyawarah yang hasilnya demi kebaikan anak.



Tentang Dampak PPDB saat ini

Sistem PPDB saat ini menyebabkan guru kesulitan mengajar karena capaian akademik siswanya terlalu beragam. Sebaiknya apa yang dilakukan sekolah?	Ketika PPDB berlandaskan pada hasil tes, sekolah memang lebih homogen. Menjadi tidak adil ketika terdapat sekolah homogen yang mayoritas siswanya siap belajar dan orangtua mereka siap untuk mendukung anak belajar, sementara di sekolah lainnya berkumpul siswa dengan kondisi yang sebaliknya. Guru yang efektif adalah guru yang mampu menggunakan berbagai strategi dan pendekatan dalam mengajar anak-anak dengan kemampuan yang berbeda-beda. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kapasitas guru-guru dalam menggunakan pendekatan yang beragam (<i>differentiated instruction</i>). Mendidik semua anak tanpa diskriminasi adalah tugas setiap satuan pendidikan. Prinsip ini berlaku untuk semua, pemerintah pusat, daerah, sekolah dan juga guru.
PPDB melahirkan kecurangan baru, yaitu manipulasi Kartu Keluarga agar anak bisa memasuki sekolah unggulan. Bagaimana jalan keluarnya?	Dengan aturan yang lebih fleksibel, diharapkan praktik seperti ini tidak lagi terjadi karena tidak ada lagi anak yang tidak mendapatkan sekolah. Harapan orangtua dan anak untuk bisa masuk sekolah tertentu terjadi ketika kualitas pendidikan tidak merata. Maka dengan perubahan sistem PPDB ini, pemerataan kualitas belajar di seluruh sekolah menjadi prioritas pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Maka dalam jangka menengah dan jangka panjang, harapannya tidak ada lagi orangtua yang menggunakan cara yang melanggar aturan dalam mendaftarkan anaknya karena kualitas sekolah sama baiknya.
Dan ada juga praktik "jual-beli bangku" di sekolah favorit, bagaimana mengatasinya?	Praktik ini sebenarnya sudah lama sering terjadi, bukan ketika diterapkan aturan zonasi saja. Hal ini merupakan masalah korupsi di sekolah secara umum. Praktik ini sudah ada baik ketika PPDB sepenuhnya jalur seleksi (sebelum ada aturan zonasi) maupun saat diterapkannya zonasi. Kita perlu kebijakan lain terkait penanggulangan korupsi untuk menghentikan praktik-praktik ini.
Jalur Zonasi tidak boleh menggunakan nilai Ujian Nasional. Tidakkah ini bertentangan dengan Pasal 68 huruf b PP SNP yang menyatakan bahwa hasil ujian nasional digunakan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya?	Dari empat jalur PPDB, salah satunya adalah jalur prestasi. Untuk jalur ini kriteria seleksi dapat menggunakan nilai Ujian Nasional. Sehingga tidak ada yang bertentangan dengan PP tersebut.



Tiga Menteri Perankan Drama Unik, Berikan Pesan Antikorupsi kepada Siswa

Jakarta, Kemendikbud --- Peringatan Hari Antikorupsi tahun ini tampak berbeda, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hadir ditengah-tengah siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 57, Jakarta, Senin (09/12). Pesan Antikorupsi disampaikan secara unik, tiga Menteri Kabinet Indonesia Maju memberikan kejutan dengan bermain drama yang diperankan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusabandio yang berperan sebagai siswa, dan Menteri Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) Erick Thohir berperan sebagai pedagang bakso.

Dua orang pemain drama lain-

nya adalah artis komedian Bedu dan Sogy Indraduadja. "Melalui drama ini mencoba menjelaskan kepada siswa mengenai bentuk perilaku antikorupsi, sebagai wujud penguatan karakter siswa," terang Mendikbud.

Mendikbud dan Sogy berperan sebagai siswa sekolah kelas X lengkap dengan pakaian SMA, Menteri BUMN menjadi tukang bakso lengkap dengan topi dan handuk di leher dan gerobak baksunya. Adapun Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Bedu berperan menjadi siswa kelas XII. Drama tersebut diceritakan terjadi pada jam istirahat sekolah. Tiga pemain awal drama adalah Sogy dan Menteri Nadiem. Sogy menjadi bendahara yang diamanahkan untuk

menjaga uang kas tapi malah ingin menggunakan uang kas itu untuk membeli bakso, sedangkan Menteri Nadiem berupaya untuk mencegah penyalahgunaan uang tersebut.

Usai menyaksikan drama tersebut, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengingatkan kepada para murid untuk belajar tidak melakukan korupsi sekecil apapun dan belajar dari hal-hal sederhana yang dilakukan sehari-hari di sekolah. "Anak-anak sejak dini harus mengetahui soal ini karena korupsi banyak menghancurkan kehidupan negara, rakyat kita," kata Presiden Joko Widodo.

Presiden mengajak siswa untuk mencegah korupsi diawali dari hal-hal sederhana di lingkungan sekolah.

"Tindak antikorupsi itu kita tidak boleh mengambil yang bukan hak kita, seperti menggunakan uang kas pentas seni untuk membeli bakso, atau beli permen pun tidak boleh karena itu bukan hak kita. Uang kas pentas seni itu uang bersama yang dikumpulkan dengan gotong royong, tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi," ujar Presiden Joko Widodo.

Pada kesempatan ini, Aisyah Aulia, siswa SMKN 67 Jakarta, mengungkapkan pesan dari drama tersebut mengugah dirinya untuk berkontribusi mengantisipasi dan menanggulangi praktek korupsi di sekitarnya. "Korupsi ini memang semua bertanggungjawab, bukan cuma pemerintah. Untuk saya, apa yang bisa saya bantu untuk menyukseskan program cegah korupsi di pendidikan kami?" tanya Aisyah kepada Presiden Joko Widodo saat sesi tanya jawab.

Menjawab pertanyaan dari siswa tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kesadaran anti korupsi memang harus ditanamkan sejak dini. Pencegahan korupsi dapat ditempuh dengan upaya saling mengingatkan jika ada teman yang berupaya untuk melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. "Tindak korupsi bermula dari hal kecil yang dapat berkembang kepada hal besar. Diingatkan secara bersama untuk



tidak melakukannya," pesan Presiden Joko Widodo.

Pada kesempatan yang sama, Muchlis R Luddin selaku Inspektur Jenderal Kemendikbud mengatakan bahwa kampanye penanaman budaya anti korupsi telah dilaksanakan sejak setahun yang lalu. Ia mengungkapkan penanaman nilai anti korupsi terangkum dalam Kampanye Anak Antikorupsi yang dilaksanakan sejak tahun 2018. "Kemendikbud secara serius menangani penanaman nilai anti

korupsi sejak dini dan sudah setahun ini dikampanyekan melalui Kampanye Anak Antikorupsi," jelasnya.

Muchlis menambahkan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai upaya kaderisasi para siswa dengan pengetahuan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme dari hal terkecil hingga besar disertai dengan pencegahannya. "Sekarang sudah hampir 1.000 anak di 34 provinsi dikader, dilatih dahulu tentang apa korupsi, kolusi, dan nepotisme dari hal kecil hingga besar, dan bagaimana pencegahannya," terangnya.

Dilanjutkannya, kegiatan ini bersifat sukarela yaitu mengundang inisiatif dari para siswa untuk dapat berbagi kepada para siswa lainnya di sekolah. "Itu secara inisiatif dan sukarela, diharapkan dapat membangun kesadaran dan mengajak teman-teman lainnya di sekolah untuk melakukan kebiasaan baik yaitu budaya antikorupsi," ujar Muchlis.

Drama pendek dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi tersebut memberikan pesan anti korupsi sejak dini, khususnya di lingkungan sekolah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dan Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dhini Shanti Purwono turut hadir dalam acara tersebut. ■

(www.kemdikbud.go.id)





Menciptakan Kepemimpinan yang Melayani di Dunia Pendidikan

Saat berbicara dalam ajang Simposium Internasional Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah pada 25 November 2019 di Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkapkan konsep kepemimpinan yang melayani (*servant leadership*) yang diharapkan bisa diterapkan di dunia pendidikan.

KONSEP *servant leadership* sebenarnya bukan hal yang baru dalam teori dan praktik kepemimpinan. Namun terbukti, konsep ini sangat relevan diterapkan di berbagai bidang.

Konsep *servant leadership* pertama kali dicetuskan oleh Robert K Greenleaf, vice president of American Telephone and Telegraph Company (AT&T), dalam buku *The Servant as Leader*. Dia menyebutkan di buku tersebut, seorang pemimpin harus

menjadi pelayan terlebih dahulu. Menurut Sendjaya dan Sarros (2002), pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang mengutamakan kebutuhan dan aspirasi orang lain ketimbang kepentingan mereka sendiri. Sedangkan menurut Spears (2002), pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang mengutamakan pelayanan. Kemudian, menurut Trompenaars dan Voerman (2010), seorang pemimpin yang melayani adalah

seseorang dengan keinginan kuat untuk melayani dan memimpin serta mampu menggabungkan keduanya sebagai hal yang saling memperkuat.

Konsep kepemimpinan yang melayani ini perlu untuk diwujudkan dalam dunia pendidikan. Implementasinya, semua rencana harus diawali dengan pertanyaan refleksi: "Apakah keputusan dan rencana ini akan berdampak positif terhadap para siswa?" Apabila jawabannya meragukan atau tidak ada sama sekali, maka tak perlu buang-buang waktu untuk membahasnya lebih jauh. Namun apabila pertanyaan itu bisa dijawab tanpa ragu-ragu, itu pertanda bahwa rencana tersebut layak untuk dibahas lebih jauh.

Kedua. Setiap pimpinan, baik di

dinas maupun kementerian, pengawas hingga kepala sekolah, perlu bertanya-tanya kepada setiap orang yang dipimpinnya: "Apakah saya telah membantu mereka dalam mengerjakan tugasnya? Bagaimana saya bisa membantu mereka?"

Ketiga, seorang pemimpin harus dapat menciptakan suatu lingkungan yang aman bagi para bawahan untuk mencetuskan gagasan, termasuk melontarkan kritik terhadap pimpinan. Setiap pimpinan mesti memberi kesempatan kepada bawahan untuk berinovasi, menciptakan sesuatu yang baru yang dianggap perlu dan bermanfaat. Bila upaya itu gagal, pemimpin yang baik tidak akan menegurnya. Sebaliknya, memberikan apresiasi karena telah berani mencoba melakukan sesuatu yang baru, kemudian memberi masukan dan mendorongnya untuk mencoba lagi. Seorang pemimpin harus tahu bahwa kegagalan adalah guru yang paling konsisten dalam mengajar.

Keempat. Seorang pemimpin yang melayani, harus berani bertanya kepada bawahan: "Bagaimana saya bisa menjadi pemimpin yang lebih baik untuk mereka?"

Pertanyaan reflektif di atas sangat penting karena akan memberi sinyal kepada mereka yang ditanya bahwa tugas seorang pemimpin adalah melayani. Dengan demikian, mereka pun dapat menginternalisasikan nilai-nilai tersebut ke lingkungan yang mereka pimpin.

Kelima. Seorang pemimpin yang melayani harus tak segan-segan turun



langsung ke bawah untuk melihat bagaimana sesuatu dikerjakan. Dalam dunia pendidikan, model ini mendorong setiap guru, kepala sekolah, bahkan pengawas sekolah, untuk turun ke kelas-kelas dan melihat bagaimana proses mengajar dan belajar berlangsung. Karena bagaimanapun, di kelas-kelas itulah semua ikhtiar untuk mencerdaskan anak bangsa dilaksanakan. Bukan di ruang-ruang rapat ataupun di kantor-kantor dinas.

Maka, penting bagi para guru,

kepala sekolah, dan pengawas untuk lebih banyak meluangkan waktu masuk ke dalam kelas dan mempelajari praktik-praktik baik yang bisa diadopsi dan mengevaluasi praktik-praktik yang dirasa perlu diperbaiki lagi.

Pertanyaan reflektif berikutnya: "Sudahkah kita semua melakukan itu?" ■

Bagus Priambodo

Sumber narasi "You Tube Channel"
Kemendikbud RI: <https://www.youtube.com/channel/UCH9AFSwY4WqgHoCLG2Xlveg>



Simposium Internasional Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Tahun 2019 mengambil tema "Innovative School Leadership to Improve Student Learning and Wellbeing". Simposium dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 27 s.d. 30 November 2019. Simposium ini menghadirkan narasumber dari negara Australia dan Filipina serta akademisi dan praktisi dari Indonesia. Ada Prof. Jane Wilkinson dari Monash University; Editha Landicho Pimentel dari SEAMEO Innotech; Prof. Dr. Syawal Gultom dari Universitas Negeri Medan; Prof. Dr. H. Muchlas Samani, M. Pd dari Universitas Negeri Surabaya; dan Patrya Pratama serta Stephanie Carter.

Dalam simposium ditampilkan para kepala sekolah dan pengawas sekolah yang telah menunjukkan sejumlah prestasi profesional di bidang tugasnya dari hasil Pemilihan Praktik Baik (best practices) dan Pemilihan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tingkat Nasional. Kemendikbud juga meluncurkan Buku Kumpulan Artikel Terbaik yang berisi inovasi kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam menjalankan tugas. Diharapkan buku ini dapat menjadi referensi bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam mengembangkan kualitas pendidikan di sekolah. (www.kemdikbud.go.id)



Membangun Pendidikan Bermutu Mustahil Tanpa Kolaborasi

COBA bayangkan, apa yang terjadi bila dalam sebuah tim sepakbola tidak terwujud komunikasi yang bagus antar pemain maupun antara pemain dengan pelatih? Mungkinkah kemenangan bisa terwujud apabila pemain tidak memahami strategi yang ditetapkan pelatih? Bisakah gol tercipta bila antar pemain tidak saling berkomunikasi saat berlaga? Mustahil bukan?

Seperti itu pula upaya kita untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu di Indonesia. Mustahil terwujud apabila tidak terjalin kolaborasi, komunikasi, dan sinergi yang baik antar pihak.



Lantas bagaimana membangun kolaborasi, komunikasi, dan sinergi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan?

Pertama, harus diingatkan kembali bahwa upaya mencerdaskan anak didik selalu dimulai dari kelas. Sebab di sanalah para murid berinteraksi dengan gurunya.

Kedua, praktik-praktik baik serta hal-hal yang perlu mendapat evaluasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung di kelas harus dibagikan satu sama lain antar guru. Maka, sudah sewajarnya apabila guru, kepala sekolah, maupun pengawas meluangkan waktu lebih banyak untuk menengok ke dalam kelas dan melihat bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Dari situ dapat diketahui, apa praktik baik yang bisa ditularkan serta praktik apa yang mesti dibenahi.

Ketiga, saling berkunjung saja tak cukup. Kolaborasi dapat diimplementasikan dengan berkumpulnya semua guru dengan kepala sekolah, pengawas, serta sesama pelaku pendidikan yang lain, untuk berbagi pengalaman, bertukar pikiran, berdebat, serta saling menggali informasi. Tujuannya, untuk menjawab pertanyaan: "bagaimana caranya menjadi guru yang lebih baik?"

Bagi guru, umpan balik atau *feedback* dari yang lain tentang caranya mengajar adalah hal yang penting untuk meningkatkan kompetensinya. *Feedback* itu bisa dia dapat apabila dia memberi kesempatan kepada guru lain, kepala sekolah, maupun pengawas sekolah untuk masuk ke dalam kelas dan menjalankan observasi.

Setidaknya, itulah hasil penelitian Khacatryan (2015) yang menyatakan bahwa apabila observasi itu dilakukan secara efektif, maka akan memungkinkan guru untuk melihat dengan cara yang berbeda. Apalagi, *self-assesment* atau penilaian mandiri yang dilakukan oleh guru terkait caranya mengajar, belum tentu dapat obyektif.

Tentang kolaborasi ini, di ajang



Simposium Internasional Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah pada 25 November 2019 di Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim sudah mengingatkan. Dia menyebutkan, pembelajaran dengan cara *feedback* dan observasi adalah cara tercepat untuk meningkatkan kompetensi pedagogi guru

serta kepemimpinan kepala sekolah. Tujuannya satu dan sangat penting: mencetak generasi berikutnya yang inovatif, kreatif, dan penuh moralitas. ■

Bagus Priambodo

Sumber narasi "You Tube Channel"
Kemendikbud RI: <https://www.youtube.com/channel/UCH9AFSwY4WqgHoCLG2Xlveg>



Menjadi Guru yang Bisa Digugu dan Ditiru

Peribahasa yang cukup terkenal berbunyi: *Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari.*

PERIBAHASA di atas bermakna bahwa apapun yang dilakukan oleh guru, akan ditiru oleh murid, mentah-mentah. Peribahasa itu punya makna yang sama dengan deskripsi orang Jawa terhadap sosok guru sebagai yang digugu lan ditiru. Yang dipercaya dan diikuti.

Bila guru kencing berdiri murid kencing berlari, serta bila Guru adalah sosok yang digugu lan ditiru, maka sudah sepantasnya hal-hal baik semata yang ditunjukkan oleh guru dalam kesehariannya, terutama di sekolah.

Guru, dalam kapasitasnya sebagai pendidik, harus tahu bahwa dia memiliki tanggung jawab untuk mencetak generasi yang inovatif, kreatif, serta bermoral. Karena tahu adanya tanggung jawab itu, maka seharusnya seorang guru harus terlebih dulu melakukannya. Dia harus menghayati perannya dengan menjadi sosok yang inovatif, kreatif, dan bermoral.

Mengenai tanggung jawab itu, di ajang Simposium Internasional Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah pada

25 November 2019 di Jakarta, Mendikbud Nadiem Makariem memberikan catatan khusus.

Disebutkannya, seorang guru punya peran untuk memampukan anak didik memiliki sejumlah kompetensi dasar yang dibutuhkan untuk



sukses di tengah berbagai perubahan yang serba cepat dan tak menentu. Kompetensi-kompetensi itu adalah kreativitas, kolaborasi, komunikasi, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir secara ilmiah, dan kebatinan atau empati.

Tentu bila mengacu pada kompetensi-kompetensi tersebut, maka sosok

pendidik seharusnya adalah sosok yang kreatif, mampu berkolaborasi, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu berpikir kritis dan ilmiah, serta harus memiliki moralitas yang baik. Dengan demikian, guru dapat mengajarkan dan mencontohkan nilai-nilai tersebut kepada para muridnya.

Beratkah tanggung jawab ini?

Tentu saja. Tetapi untungnya semua itu tak perlu dikerjakan sendiri.

Para guru dan kepala sekolah mesti menjadi tim yang baik. Tim yang saling memberi semangat, mengingatkan, memotivasi, serta mengkritik satu sama lain. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi siswa pun, sebaiknya dibahas bersama untuk dicari solusi terbaik.

Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan itu? Atau kita masih terjebak pada ambisi masing-masing? Atau kita masih merasa bisa melakukan semuanya sendiri dan menjadi 'bos' untuk diri kita sendiri? Kalau jawabannya iya, maka marilah berubah. Ingat, di luar kita, perubahan telah terjadi. Bahkan, terlalu cepat! ■

Bagus Priambodo

Sumber narasi "You Tube Channel"
Kemendikbud RI: <https://www.youtube.com/channel/UCH9AFswY4WqgHoCLG2Xlveg>





Guru Penggerak Harus Dicari, Dilindungi, dan Dimotivasi

Di setiap lingkungan, selalu ada sosok-sosok penggerak. Mereka adalah sosok-sosok yang berani melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah perubahan yang positif. Seringkali, mereka bahkan berani mendobrak tradisi karena didorong oleh misi mewujudkan kondisi yang lebih baik dari yang sebelumnya.

SOSOK-sosok penggerak ini juga ada di lingkungan pendidikan di daerah-daerah. Mereka mungkin tidak cukup populer dan tidak tersorot oleh radar media. Bahkan, tidak jarang sosok ini dikucilkan oleh orang-orang di lingkungannya karena dianggap berbeda dari orang kebanyakan dan dianggap sebagai ancaman.

Sosok-sosok inilah yang harus ditemukan, khususnya di sekolah. Guru-guru penggerak ini pasti ada meski di sebuah sekolah jumlahnya tak banyak, atau hanya ada satu orang saja.

Dalam Simposium Internasional Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah pada 25 November 2019 di Jakarta, Mendikbud RI, Nadiem Makarim me-

minta agar para kepala sekolah menemukan sosok-sosok guru penggerak tersebut dan melindunginya.

Tak cukup dilindungi, guru penggerak itu harus diberi dukungan dan diberi kewenangan untuk melakukan perubahan yang diinginkan.

Sosok guru penggerak ini sebenarnya cukup mudah ditemukan di sekolah. Ciri-cirinya, terkadang guru penggerak tampak seperti sosok yang 'nakal'. Dalam artian, dia tak segan membuat kurikulum sendiri yang bisa membuat para siswa lebih "engaged" dengan materi yang diberikan, tak segan mengajak anak didiknya keluar kelas untuk mempelajari sesuatu secara langsung, serta tak segan untuk

mempelajari metode-metode baru dari berbagai sumber termasuk media sosial Youtube dan lain sebagainya. Sayangnya, terobosan-terobosan dan inovasi yang mereka buat hampir-hampir tak pernah tersentuh apresiasi.

Padaahal, seharusnya, sosok-sosok guru penggerak ini harus didukung. Kepala sekolah mestinya siap pasang badan baginya sehingga dia semakin termotivasi untuk menciptakan terobosan-terobosan baru lainnya. Prinsipnya, guru-guru penggerak ini harus diberi kepercayaan diri. Bila perlu, semua yang dia lakukan, perlu dipamerkan kepada guru-guru lain. Harapannya, tentu saja supaya guru-guru lain pun termotivasi untuk melakukan perubahan yang sama.

Jadi, sudahkah Anda tahu sosok-sosok guru penggerak itu? Atau jangan-jangan, Anda sendirilah orangnya? ■

Bagus Priambodo

Sumber narasi "You Tube Channel"
Kemendikbud RI: <https://www.youtube.com/channel/UCH9AFSwY4WqgHoCLG2Xlveg>

Apakah Benar Kita Butuh Ujian Nasional?

Sebelum akhirnya Ujian Nasional ditetapkan menjadi Ujian Nasional terakhir tahun ini, beberapa waktu lalu sekitar bulan November, wacana mengenai Ujian Nasional (UN) memang telah mengemuka. Di media massa, bersliweran isu tentang rencana penghapusan Ujian Nasional. Sontak, rumor itu pun menjadi perbincangan. Ada yang setuju, ada pula yang menolak mentah-mentah.

PERTANYAAN besarnya sebenarnya bukanlah apakah benar UN akan dihapus atau tidak. Seharusnya, pertanyaan penting yang harus dijawab adalah apakah UN telah menjamin peningkatan mutu pendidikan? Pasalnya, harus diakui bahwa selama ini banyak aturan yang dikeluarkan dengan itikad baik, namun belum dievaluasi apakah aturan itu benar-benar dapat meningkatkan mutu.

Ujian nasional, idealnya adalah tes berskala nasional yang menjadi alat evaluasi sistem pendidikan, baik sekolah maupun wilayah. Faktanya di lapangan, UN menjadi praktik untuk mengukur prestasi siswa. Padahal, mengingat jumlah kurikulum yang sangat padat dan besar, pendidikan semata menjadi proses penghafalan semata.

Menurut Mendikbud RI, Nadiem Makarim, siswa pun dirugikan. Mereka dipaksa unggul di pelajaran-pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional meski pelajaran tersebut tak sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Hal tersebut disampaikan pada Simposium Internasional Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah pada 25 November 2019 di Jakarta

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan



an spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Di dalam UU itu pula disebutkan, bahwa pendidikan nasional diselenggarakan dengan fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam sistem pendidikan tersebut, salah satu hak yang dimiliki para siswa adalah mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

Berkaca pada hak tersebut, memang wajar apabila kemudian muncul pertanyaan apakah pelaksanaan Ujian Nasional dapat relevan dijadikan tolok ukur prestasi siswa? Bagaimana apabila mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional ternyata tidak sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan para siswa tersebut?

Karena itu, kemudian muncullah gagasan untuk mengubah desain atau cara mengukur dan mengevaluasi sistem pendidikan yang lebih progresif daripada Ujian Nasional. Tolok ukur yang dimaksud itu harus relevan untuk diterapkan secara nasional, sekaligus tidak membebani siswa dan guru. Prinsipnya, alat pengukuran itu harus berdasarkan pada apa yang dicari, yakni kompetensi dasar.

Mungkin ujian nasional tidak akan benar-benar dihapuskan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjadikan ujian nasional itu semakin relevan dengan kebutuhan saat ini untuk menciptakan pendidikan adil dan bermutu yang fokus pada pengembangan anak didik. ■

Bagus Priambodo

Sumber narasi: "You Tube Channel"

Kemendikbud RI: <https://www.youtube.com/channel/UCH9AFSwY4WqgHoCLG2Xlveg>

Manajemen 'KOPI' & Bengkel Karakter

SMK BRANTAS KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR

Sekolah Menengah Kejuruan atau yang disingkat SMK adalah jenjang pendidikan yang memang menyiapkan para lulusannya untuk memasuki dunia kerja. SMK Brantas Karangates adalah salah satu SMK swasta di Kabupaten Malang yang merupakan Sekolah Model SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) Binaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur.



SEBENARNYA SMK ini sudah layak menjadi Sekolah Rujukan, karena realitanya banyak sekolah-sekolah di dalam dan luar Jawa yang berkunjung ke sekolah ini untuk mengetahui bagaimana SMK ini secara langsung, mulai dari profil PTKnya (Pendidik Tenaga Kependidikannya), siswa/murid/peserta didiknya, manajemen pembelajarannya, sampai dengan kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Apa yang membedakan SMK Brantas Karangates ini dengan SMK lainnya di Kabupaten Malang? SMK Brantas menggunakan **Manajemen KOPI** dan **Bengkel Karakter (BK)**. Apa itu **Manajemen KOPI**? **K** adalah **Komit-**

men, **O** adalah **Optimis**, **P** adalah **Pelayanan** dan **I** adalah **Ikhlas**. Semua warga sekolah harus punya komitmen terhadap aturan dan program sekolah. Mulai dari level Top Manajemen sampai tukang sapu sekolah mempunyai komitmen yang sama terhadap kemajuan siswa.

Saat ini SMK Brantas Karangates memiliki 2.000 orang siswa yang terbagi ke dalam 57 rombel (rombongan belajar) terdiri atas 9 program kompetensi keahlian. Luar biasanya sekolah ini tidak diberi pagar selayaknya sekolah-sekolah lainnya. Akan tetapi tidak ada siswa yang melarikan diri di tengah-tengah pembelajaran. Ini menjadi indikator bahwa

anak-anak merasa nyaman di sekolah. Hal ini bisa terjadi karena mereka memang membutuhkan ilmu yang disampaikan para guru yang menyenangkan dan membuat aman para siswa.

Polling untuk melakukan penilaian terhadap kinerja guru dilakukan secara rutin. Hal ini untuk mengevaluasi cara mengajar para guru, sehingga kalau pollingnya menunjukkan nilai yang jelek, maka gaji guru tersebut akan turun sebagai bentuk "punishment". Sebaliknya untuk yang nilainya bagus, maka akan ada "reward" dari SMK Brantas. Sehingga para guru akan berusaha meningkatkan layanan terhadap siswa melalui pembelajarannya yang menye-





nantikan dan membuat siswa betah di sekolah tanpa ada tekanan.

Pihak Sekolah betul-betul memperhatikan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Jam masuk di SMK Brantas pukul 06.30, kalau ada guru atau tenaga kependidikan yang datang pukul 06.15, secara otomatis akan mendapat reward berupa tambahan uang. Begitu juga jika melebihi jam pulang, juga akan ada tambahan uang lembur.

Sekolah tidak menyediakan lahan parkir, karena lahan parkir diserahkan ke warga sekitar untuk mengelolanya, termasuk kantin juga dikelola oleh warga sekitar. Catatan untuk pengelola kantin adalah tidak boleh menjual rokok. Ini bentuk peraturan yang diterapkan oleh sekolah untuk menjaga kesehatan anak-anak, karena tiap bulan ada cek urin untuk semua siswa baik laki-laki maupun perempuan.

Pelibatan masyarakat sekitar adalah bentuk strategi yang jitu agar masyarakat sekitar merasa ikut memiliki sekolah sekaligus untuk mengangkat perekonomian masyarakat sekitar. Termasuk kerjasama dengan orang tua, salah satunya adalah orang tua dilibatkan untuk menjadi pengawas pada saat anak-anak ujian semester. Para orang tua dipersilahkan untuk mendaftar, lalu

yang terekrut akan dibekali bagaimana menjadi pengawas dan dibayar oleh pihak sekolah layaknya pengawas ujian yang sebenarnya.

Ketika ada anak yang tidak masuk, hari itu juga tim dari Bengkel Karakter (BK) segera home visit ke rumah yang bersangkutan dengan membawa buah tangan. Hal ini sebagai bentuk perhatian dari sekolah kepada siswa dan orang tua. Sekolah betul-betul ingin menyiapkan lulusannya menjadi lulusan yang terampil dan berkarakter, karena karakter ini yang memang dicari oleh Dunia Kerja. Untuk apa terampil tetapi tidak berkarakter.

Banyak Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang selalu minta lulusan dari SMK Brantas, karena terbukti lulusannya terampil sekaligus berkarakter bagus. Pembentukan Karakter tidak bisa lewat Sistem Kebut Semalam (SKS) pada saat mau wawancara, tetapi melalui pembiasaan, baik melalui performance cara berpakaian, cara bersalaman ketika bertemu dengan orang, cara berbicara dengan orang yang lebih tua, pembiasaan ibadah, tidak sering mbolos dan lain-lain.

Ada 5 pesan moral yang diajarkan di SMK Brantas Karangates yaitu SIKAP.

S=SEHAT. Anak-anak dibiasakan selalu sehat jasmani dan rohani, diantaranya ada larangan merokok seperti yang diuraikan di atas. Bagaimana untuk memantau di rumah? Kan ada tes urin.

I= IMAN dan TAQWA. Melalui pembiasaan ibadah yang disediakan di sekolah, anak-anak dibantu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

K=KERJA KERAS. Setiap anak sudah punya rencana yang positif mulai bangun tidur hingga tidur lagi.

A=ANTUSIAS. Sebagai calon lulusan SMK Brantas, siswa dilatih untuk antusias mengikuti materi apa saja dengan fokus, sehingga *skill* yang dimiliki bisa maksimal sesuai harapan dunia kerja. Ketika mereka sudah lulus pun, harus siap ditempatkan bekerja dimana saja, tidak boleh pilih-pilih.

P=PENAMPILAN. Hal ini sudah dibiasakan melalui seragam yang digunakan oleh siswa. Sangat rapi penampilan anak-anak. Karena *role model* dari para guru juga rapi. Semua guru laki-laki berdasi dan berpakaian rapi. Sekolah juga siap menghadirkan tukang cukur untuk mencukur rambut anak-anak yang tidak rapi.

Semoga SMK Brantas Karangates Kabupaten Malang bisa menjadi Sekolah Rujukan, karena realitanya SMK ini sudah menjadi rujukan bagi SMK-SMK lain yang ingin sukses seperti SMK Brantas Karangates Kabupaten Malang.

“Sukses bukan turunan, tapi milik semua orang, asal mau berusaha dan disiplin”. ■

Winarti



Mendikbud Lantik Empat Pejabat Tinggi Madya

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim melantik empat Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Empat Pejabat Tinggi Madya Kemendikbud yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 175/TPA Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2019.

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul menjadi prioritas pemerintah saat ini. Disebutkan Mendikbud, pemerintah mendorong terwujudnya SDM yang berkarakter pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemendikbud memiliki peranan penting dan strategis untuk menyiapkan SDM unggul dan berkarakter.

"Saya mohon pejabat yang baru dilantik untuk membuat terobosan yang lompatan besar untuk menjawab tantangan tersebut," disampaikan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim dalam sambutannya di Grha Utama, kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (16/12).

Ainun Na'im dilantik sebagai Sekretaris Jenderal menggantikan Didik Suhardi. Guru besar Universitas Gadjah Mada ini sebelumnya memangku jabatan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) pada Kabinet Kerja.

Kepada Sesjen yang baru saja dilantik, Mendikbud berharap agar semakin mempertajam fungsi koordinasi. Khususnya setelah kembalinya urusan pendidikan tinggi. "Agar program-program kementerian tidak saling tumpang tindih. Benar-benar memberi dampak dan berjalan secara efektif dan efisien," pesan Mendikbud Nadiem.

Mendikbud mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Sekretaris Jenderal Kemendikbud periode

2014 -- 2019, Didik Suhardi. "Saya berharap Bapak terus menyumbang pemikiran dan karya bagi Kementerian maupun bagi bangsa yang tercinta," pesannya.

Sementara itu, Muchlis Rantoni Luddin dilantik kembali dalam jabatan Inspektur Jenderal (Irjen). Kepada Irjen, Mendikbud berpesan agar Inspektorat Jenderal tidak hanya berperan sebagai pengawas. Tetapi, semakin berperan untuk memperkuat fungsi pencegahan.

Hilmar Farid dilantik kembali sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan. Kepada Mendikbud meminta agar Direktorat Jenderal Kebudayaan mampu memperbanyak program dan kegiatan yang melibatkan para pemuda dan generasi milenial. "Agar tumbuh kecintaan kepada budaya bangsa sendiri. Dan bisa menandingi dahsyatnya arus budaya luar, supaya budaya kita tidak asing di mata bangsa sendiri," tutur



Mendikbud.

Kemudian, Chatarina Muliana Girsang dilantik sebagai Staf Ahli Mendikbud bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan. Mendikbud menitipkan tugas untuk menghadirkan terobosan dalam bidang regulasi yang menyentuh persoalan pendidikan. "Dan benar-benar menjadi solusi yang tepat," kata Mendikbud.

Turut hadir menjadi saksi pelantikan, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD Dikmas) Harris Iskandar serta Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Supriano.

Untuk membangun SDM unggul, tidak mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri. "Mari kita bersinergi dan berkolaborasi untuk menghadapi tantangan dan mengatasi persoalan pendidikan," ajak Mendikbud di akhir sambutannya. ■

(www.kemdikbud.go.id)

Mendikbud: Pertajam Fungsi Koordinasi Birokrasi, Perkuat Regulasi yang Solutif

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim melantik Ainun Na'im sebagai Sekretaris Jenderal menggantikan Didik Suhardi. Dalam sambutannya, Mendikbud mengimbau agar pejabat yang baru dilantik dapat membuat terobosan sesuai dengan program prioritas pemerintah yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul.

Disebutkan Mendikbud, pemerintah terus mendorong terwujudnya SDM yang berkarakter pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, Kemendikbud memiliki peranan penting dan strategis untuk menyiapkan SDM unggul dan berkarakter.

"Saya mohon pejabat yang baru dilantik untuk membuat terobosan yang lompatan besar untuk menjawab tantangan tersebut," disampaikan Mendikbud dalam sambutannya, di Grha Utama, kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (16/12).

Mendikbud berharap Sekretaris Jenderal dapat mempertajam fungsi koordinasi setelah bergabungnya pendidikan tinggi ke Kemendikbud. Hal tersebut penting dilakukan agar program yang ada tidak tumpang tindih dan dapat memberikan dampak nyata serta berjalan dengan efektif dan efisien.

Menyambut arahan Mendikbud, Ainun mengutarakan bahwa ia akan lebih fokus untuk memenuhi misi atau harapan yang disampaikan Presiden mengenai pengembangan SDM. "Pesan Pak Menteri, harus ada koordinasi antar unit utama dalam hal ini dirjen-



dirjen supaya kinerja bisa lebih fokus dan lebih baik agar tidak ada tumpang tindih dalam birokrasi sehingga target pembangunan tercapai," ujar Ainun.

Sedangkan kepada Chatarina Muliya Girsang yang pada kesempatan yang sama dilantik sebagai Staf Ahli Mendikbud bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud menitipkan tugas untuk menghadirkan terobosan dalam bidang regulasi yang menyentuh persoalan pendidikan. "Perkuat regulasi yang menyentuh persoalan pendidikan supaya benar-benar menjadi solusi yang tepat," tekannya.

Menjawab permintaan Mendikbud tersebut, Chatarina menyampaikan bahwa ia sudah mulai melakukan pemetaan terhadap sejumlah regulasi terutama aturan yang terkait dengan guru, dosen dan tenaga pendidik. "Saya akan mengevaluasi kembali regulasi yang dapat menghambat, yang tumpang tindih. Kita lihat di birokratisasi hal-hal yang akan menghambat pencapaian tujuan khususnya program SDM unggul itu," terangnya.

Ia menambahkan bahwa dari hasil pemetaannya hingga saat ini, ditemukan beberapa regulasi yang saling berkaitan. "Kita menginventarisir undang-undang yang terkait dengan guru sampai dengan turunannya, termasuk regulasi pendidikan yang terkait dengan pendidikan dasar menengah dan PAUD," ucapnya.

Regulasi yang berkaitan dengan guru, kata Chatarina, merupakan prioritas, karena guru adalah penggerak lajunya pendidikan di Indonesia dan menjadi ujung tombak penentu keberhasilan kemerdekaan belajar. "Pertama guru, karena yang langsung merasakan dampaknya selama ini. Di situlah sebenarnya motor penggerak pembaruan pendidikan yang ingin kita capai, tentu saja termasuk dosen dan tenaga pendidik itu fokus utama kita. Hal-hal seperti pemenuhan beban kerja dan beberapa standar lainnya juga akan segera disesuaikan mulai dari permendikbud, PP hingga undang-undang akan kita cermati kembali," pungkasnya. ■

(www.kemdikbud.go.id)

Tingkatkan Kompetensi ASN, Kemendikbud Gelar Rakor Pelatihan 2019

Sawangan, Kemendikbud --- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah meletakkan dasar yang kuat dalam mewujudkan birokrasi yang melayani publik melalui profesionalitas ASN. Peran penting ASN sangat mempengaruhi kinerja birokrasi sehingga ASN harus mendapatkan prioritas dalam pengembangan kompetensi.

Menindaklanjuti hal itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(Kemendikbud) melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (Pusdiklat Pegawai) menggelar Rapat Koordinasi Pelatihan Tahun 2019, berlangsung pada 16 s.d. 18 Desember 2019.

Kepala Pusdiklat Pegawai Kemendikbud, Garti Sri Utami, mengatakan melalui rakor ini Pemerintah harus mengetahui bagaimana perencanaan program dan anggaran terkait pengembangan kompetensi ASN. "Kami harapkan melalui rakor

ini kami dapat memetakan dengan baik terkait pengembangan kompetensi ASN yang telah direncanakan dan hendaknya memperhatikan dinamika kebutuhan organisasi yang siap menghadapi perubahan untuk mewujudkan pelayanan publik dengan birokrasi kelas dunia untuk lima tahun ke depan," ujar Garti, saat membuka rakor, di Pusdiklat Pegawai Kemendikbud, Bojongsari, Depok, Senin (16/12/2019).



Pengembangan kompetensi ASN, menurut Garti, merupakan bagian dari pengembangan SDM yang menjadi prioritas kementerian bahkan seluruh kementerian dengan berbasis sistem merit. "UU ASN juga memberikan mandat kepada semua instansi Pemerintah untuk melakukan reformasi pengelolaan ASN yang mengacu pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja," jelasnya.

Pemerintah telah menetapkan hak pengembangan kompetensi ASN atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama 20 jam pelajaran per tahun. Sedangkan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) maksimal 24 jam per tahun. Pengembangan kompetensi ini, dikatakan Garti, dapat dilakukan baik melalui pendidikan dan atau pelatihan.

"Pelatihan dapat dilaksanakan

secara klasikal atau pembelajaran tatap muka, misalnya seminar, kursus, penataran atau yang nonklasikal. Kita memang akan mengarah ke sana baik dalam bentuk coaching, mentoring, konseling ataupun pendidikan jarak jauh, belajar mandiri (e-learning) bunchmarking, pertukaran pegawai, magang, data sharing, yang mungkin kami ini masih belum ada penerapannya," ujar Garti.

Pada kesempatan ini, Asisten Deputi Bidang SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bambang Dayanto Sumarsono, mengatakan melalui pelatihan yang digelar oleh Pusdiklat ini merupakan persiapan budaya kerja terkait penyederhanaan jabatan eselon III dan IV di seluruh kementerian. "Kami harapkan dengan perampingan organisasi, ini akan

menjadi fungsional yang profesional, sudah tidak lagi mengurus hal-hal yang administratif," ujarnya.

Rapat Koordinasi Pelatihan Tahun 2019 di lingkungan Kemendikbud diselenggarakan dengan tujuan untuk mensinergikan perencanaan pelatihan pada satuan kerja dengan rencana program prioritas pelatihan tahun 2020 di Pusdiklat Pegawai Kemendikbud, sehingga penyelenggaraan pengembangan kompetensi terintegrasi, berkualitas, dan akuntabel.

Peserta Rapat Koordinasi Pelatihan ini adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi SDM pada unit utama, Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemendikbud, dengan jumlah peserta 270 orang. ■

(www.kemdikbud.go.id)



BERKACA DARI STUDI PISA 2018:

Guru dan Orangtua Harus Menjadi Partner yang Kompak

HASIL penelitian yang dilakukan Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 terhadap 72 negara telah menempatkan Indonesia di peringkat keenam dari bawah. Studi PISA tersebut dilakukan berdasarkan tes selama 2 jam yang melibatkan 600 ribu siswa berusia 15 tahun dari negara-negara peserta. Di dalam studi tersebut, yang diuji adalah kemampuan literasi, kemampuan matematika dan kemampuan sains.

Di bidang literasi, hasil studi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan baca siswa-siswa di Indonesia masih di bawah rata-rata. Bila rata-rata negara OECD (The Organisation for Economic Co-Operation and Development) meraih skor 487, Indonesia mendapat skor 371.

Tak jauh berbeda di bidang matematika dan sains. Rata-rata negara anggota OECD mendapat skor 489. Sedangkan Indonesia meraih skor 370 untuk matematika dan 396 untuk Sains.

Beragam reaksi muncul setelah hasil penelitian itu diumumkan kepada publik. Tentu semuanya bernada prihatin karena harus menerima realita bahwa pendidikan Indonesia masih jauh tertinggal oleh negara lainnya.

Adalah sinyal yang cukup baik bila kita semua prihatin setelah melihat hasil studi tersebut. Setidaknya, di dalam hati, kita masih punya harapan yang sama agar di masa mendatang, pendidikan Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain.

Namun prihatin saja tak cukup. Sama halnya dengan yang disampaikan Mendikbud Nadiem Makarim, hasil studi ini adalah masukan berharga untuk mengevaluasi dan membenahi sistem pendidikan nasional. Dari studi ini, kita semestinya mulai bertanya: "Apa yang mesti dilakukan?"

Pertanyaan reflektif ini berlaku untuk siapa saja. Baik itu guru, pejabat dan staf di dinas-dinas, pejabat dan staf-staf di lingkungan Kementerian Pendidikan,



para pemimpin di daerah-daerah, hingga masyarakat.

Partnership guru dan orangtua

Dari sekian banyak pemangku kepentingan, guru dan orangtua adalah ujung tombak dalam strategi meningkatkan mutu pendidikan. Ibarat kata, mereka adalah tombak bermata dua yang tidak seharusnya dipisahkan.

Tentang vitalnya peran guru telah disadari betul oleh kementerian. Buktinya, dari sekian banyak rencana yang telah disusun, pemerataan jumlah guru serta peningkatan mutu guru berada di daftar paling atas.

Wajar bila guru menjadi salah satu ujung tombak dalam upaya peningkatan mutu pendidikan ini. Sebab, merekalah yang sehari-hari bersentuhan dan berinteraksi dengan siswa. Di kelas, mereka menerapkan strategi-strategi pembelajaran yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya.

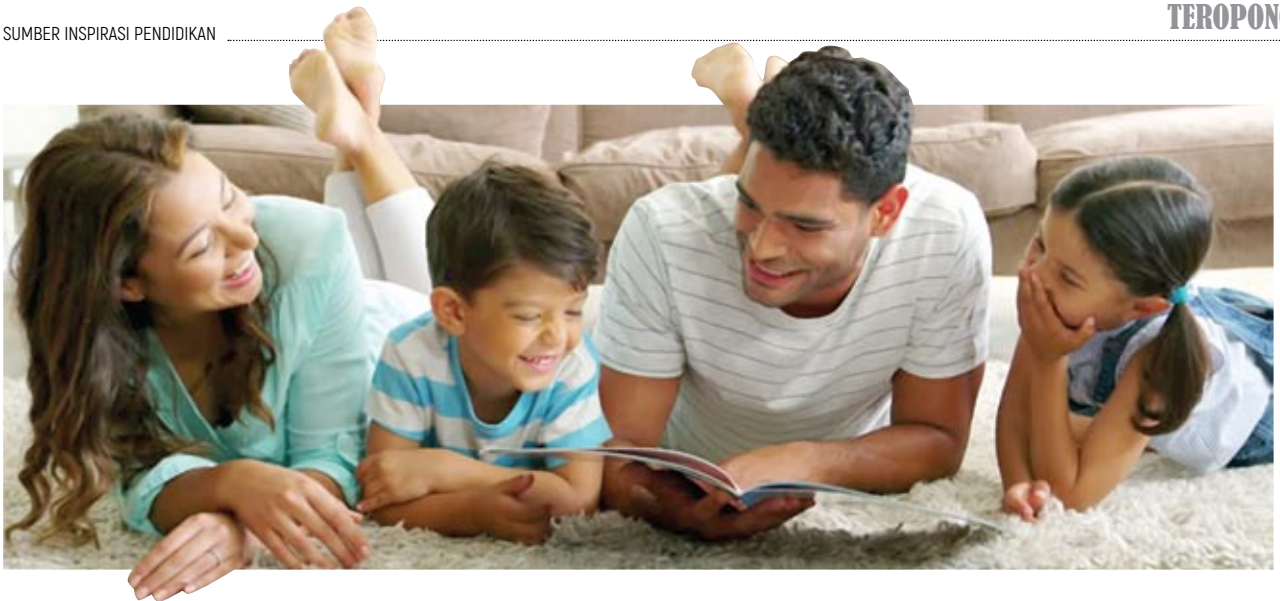
Namun kita tahu, guru tak semestinya berjalan sendiri. Beban berat untuk mewujudkan generasi emas, tak semestinya dibebankan sepenuhnya kepada guru. Maka, peran serta orangtua di rumah juga

dibutuhkan.

Karena itulah menjadi penting untuk menciptakan kerjasama dan komunikasi yang baik antara guru (sekolah) dengan orangtua murid. Di antara keduanya harus terbentuk sebuah partnership. Artinya, orangtua harus tahu bagaimana strategi pembelajaran di sekolah berlangsung sehingga dapat memodifikasinya di rumah untuk memastikan bahwa strategi pembelajaran itu dapat berlanjut meski di luar sekolah.

Sebagai permisalan, apabila guru membiasakan siswa membaca satu karya sastra dalam seminggu, orangtua pun selayaknya memberi dukungan dengan cara-cara yang mereka bisa lakukan. Contohnya, mendampingi anak ke perpustakaan, mendampingi anak membaca, dan bila mampu, memastikan di rumah tersedia bahan bacaan yang cukup serta suasana yang mendukung anak membaca dengan baik. Dengan demikian, kita bisa berharap penelitian PISA berikutnya, tingkat literasi para siswa di Indonesia bisa melompat ke ranking yang lebih baik. ■

Bagus Priambodo



Membangun Literasi Harusnya Dimulai dari Rumah

Buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku, anak akan diajak membuka pikirannya untuk memandang cakrawala yang lebih luas di luar lingkungannya.

KEBIASAAN membaca harus dimulai sejak dini. Kebiasaan dan budaya membaca itu harus dimulai dari rumah. Tentu, orangtua punya peran paling krusial dalam upaya ini.

Persoalannya, tak semua orangtua memahami ini. Alih-alih mengajak anak membaca, banyak orangtua yang membiasakan anaknya beraktivitas dengan gawai demi membuat mereka senang dan diam.

Selain tak paham bahwa kebiasaan memberikan gawai kepada anak bisa berdampak terhadap tumpulnya minat anak pada buku, juga tak banyak orangtua yang tak terbiasa membaca. Maka, mustahil mereka bisa membiasakan anak membaca bila mereka sendiri tak terbiasa melakukan itu.

Lalu bagaimana minat baca itu dikembangkan di rumah?

Pertama, orangtua harus memberikan contoh kepada anak. Caranya, tentu saja dengan orangtua membiasakan diri untuk membaca. Bahkan, terhadap anak-anak usia dini yang belum

mengenal aksara, orangtua dapat mulai belajar membacakan buku-buku cerita secara rutin. Dengan demikian, sejak dini anak sudah akrab dengan buku.

Kedua, minat membaca mustahil muncul apabila tak tersedia bahan-bacaan yang relevan untuk anak. Karenanya, apabila memungkinkan, orangtua bisa menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk membeli buku bagi anak-anaknya. Bila memungkinkan, sisakan sedikit ruangan di rumah yang bisa dimanfaatkan untuk membangun perpustakaan mini. Dengan begitu, anak akan dibiasakan dekat dengan bahan bacaan.

Ketiga, apabila memang tak memungkinkan untuk membeli buku bacaan bagi anak, orangtua dapat meluangkan waktu mengajak anak mengunjungi perpustakaan-perpustakaan yang tersedia di lingkungannya. Selama berkunjung ke perpustakaan, ciptakan kesan bahwa membaca adalah hal yang menyenangkan.

Keempat, biasakan anak untuk

menceritakan isi dari buku-buku yang dilalapnya serta pesan apa yang didapat dari membaca buku tersebut. Dengan komunikasi semacam ini, motivasi anak untuk terus menambah bacaan, dapat meningkat.

Kelima, setelah anak-anak telah terbiasa membaca buku, tahapan berikutnya adalah ajak anak untuk mulai menulis. Tentu saja, membiasakan anak untuk menulis membutuhkan upaya yang berbeda lagi. Orangtua tentu tak bisa berharap anaknya langsung memiliki keterampilan menulis. Namun ketika kegiatan ini dibudayakan, anak tak hanya akan terbiasa mengonsumsi gagasan dari buku-buku yang dibaca, namun juga terbiasa mengungkapkan gagasan, pengalaman, dan perspektifnya sendiri.

Dengan upaya-upaya ini, ketika di sekolah, anak tak akan lagi kesulitan ketika ditantang untuk membaca. Sebaliknya, mereka akan merasa senang dan tertantang ketika mendapat tugas membaca dari guru-gurunya. Pada akhirnya, kita bisa berharap di masa mendatang, anak-anak akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, terampil meramu gagasan, dan berwawasan luas. ■

Bagus Priambodo



Anak-anak Indonesia Butuh Lebih Banyak Perpustakaan

Rendahnya kemampuan literasi anak-anak di Indonesia tercermin dari hasil studi yang dilakukan oleh Programme for International Student Assesment (PISA) 2018. Hasil studi tersebut menunjukkan, kemampuan literasi anak-anak di Indonesia jauh di bawah rata-rata negara-negara OECD (The Organisation for Economic Co-Operation and Development). Dengan skor 371, Indonesia berada di peringkat enam dari bawah, di antara 72 negara yang diteliti.



OLEH UNESCO, literasi didefinisikan sebagai seperangkat keterampilan, khususnya keterampilan kognitif membaca dan menulis. Keterampilan yang dimaksud di sini bukan sekadar kemampuan mengenali aksara atau menulis aksara. Yang lebih penting adalah kemampuan untuk memahami ide atau gagasan yang ada di dalam bacaan, serta menuangkan dan mengembangkan gagasan melalui tulisan.

Kemampuan literasi adalah kemampuan yang penting. Dengan kemampuan ini, anak dapat memperoleh ide-ide baru maupun informasi-informasi baru yang berkembang menjadi wawasan baru. Wawasan inilah yang kelak dibutuhkan, salah satunya untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik serta menghindari kemiskinan.

Bila merujuk pada BPS serta Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud yang mengumumkan bahwa angka buta huruf di Indonesia hingga akhir 2018 hanya tinggal 2,07 persen, sejatinya permasalahan utama bangsa ini bukanlah ketidakmampuan untuk mengenali aksara. Masalah paling genting adalah sepiunya minat baca dari mereka yang sudah bisa membaca.

Menurut Sinambela (2005), minat membaca ialah sikap positif dan adanya rasa keterikatan dalam diri anak terhadap aktivitas membaca dan tertarik terhadap buku bacaan. Aspek minat membaca meliputi kesenangan membaca, frekuensi membaca dan kesadaran akan manfaat membaca. Sedangkan menurut Kamah (2002: 5), minat baca berarti adanya perhatian atau kesukaan (kecenderungan hati) untuk membaca.

Dirangkum dari berbagai sumber, rendahnya minat membaca di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, masih kuatnya budaya dengar dan budaya lisan, kondisi sosial dan ekonomi, kemajuan teknologi komunikasi yang kian cepat, serta sistem belajar dan kurikulum di sekolah yang kurang menunjang kegembiraan membaca dan menulis.

Dengan kondisi seperti yang ditemukan oleh PISA 2018, pertanyaan penting bagi kita semua insan-insan pendidikan adalah bagaimana strategi yang pas untuk mendorong minat baca anak yang berujung pada peningkatan kemampuan literasi?

Sebelum beragam jawaban direfleksikan bersama, perlu kita sadari bahwa beban untuk mendorong kemampuan literasi pada anak adalah beban bersama dari semua elemen, baik instansi-instansi pendidikan, pemerintah dan pemerintah daerah, swasta, hingga lingkungan terdekat anak,

yaitu keluarga. Lalu, semua pihak tersebut harus sepakat bahwa kita sedang memerlukan cara-cara yang terorganisir, sistematis, dan komprehensif, untuk mendorong peningkatan minat membaca.

Sebagai bagian dari cara-cara yang terorganisir, sistematis, dan komprehensif tersebut adalah memastikan tersedianya infrastruktur membaca, di antaranya adalah ketersediaan buku, bahan-bahan bacaan lain, serta perpustakaan.

Ketersediaan infrastruktur membaca ini memang problem yang cukup pelik. Klise memang, tapi persoalan anggaran kerap disebut-sebut sebagai faktor penghambat tersedianya perpustakaan yang memadai di daerah-daerah.

Untuk menjawab problem tersebut, pemerintah melalui Perpustakaan Nasional, berinisiatif untuk melakukan perluasan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Salah satu kegiatan dalam inisiatif itu adalah memperluas transformasi perpustakaan hingga ke desa-desa untuk mendekatkan masyarakat di desa terhadap akses informasi.

Namun hal itu tak cukup. Mengingat, berdasarkan data BPS, pada 2018, di Indonesia terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat desa. Artinya, apabila kegiatan itu hendak dilakukan secara merata ke seluruh desa, diperlukan *effort* dan waktu yang luar biasa.

Karena itulah, pemerintah perlu mendorong terwujudnya sinergi dengan pihak-pihak lain. Swasta misalnya, dapat didorong untuk terlibat membangun perpustakaan di desa-desa sekitar tempat fasilitas produksi mereka melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kemudian, masyarakat perlu dibangun gairahnya untuk menciptakan perpustakaan-perpustakaan mini di lingkungan masing-masing. Tentu saja, inipun harus dibarengi dengan tindakan-tindakan mengajak anak-anak untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas membaca. Termasuk, orangtua mulai mengurangi peluang anak-anak untuk mengakses perangkat-perangkat digital yang sejauh ini lebih banyak mengalihkan perhatian dan minat anak-anak terhadap bacaan.

Tentu ini saja tak cukup. Masih banyak upaya yang mesti kita kerjakan untuk mendorong tumbuhnya kemampuan literasi anak-anak Indonesia. Namun, dengan tersedianya infrastruktur membaca, kita dapat berharap di tahun-tahun mendatang ada perkembangan yang signifikan dalam kemampuan literasi tersebut. ■

Bagus Priambodo

Tak Hanya Pemerataan Mutu Pendidikan, Gerakkan Perubahan di Kelas Juga Diperlukan

Ungkapan 'Tuntutlah Ilmu Sampai ke Negeri Cina', secara literal mungkin masih sangat relevan hingga kini. Pasalnya, saat ini kita bisa melihat bagaimana negeri Tirai Bambu tersebut berkembang sedemikian pesat, khususnya di bidang teknologi.

NAMUN bukan teknologi saja yang dibanggakan Tiongkok. Sistem pendidikan mereka juga mengalami perkembangan yang luar biasa. Bahkan, berdasarkan studi PISA (Programme for International Student Assessment) yang dilakukan OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development), Cina menempatkan 4 provinsinya di peringkat paling atas. Diikuti kemudian di peringkat kelima oleh Singapura. Studi tersebut mengukur kecerdasan literasi, kecerdasan matematika, serta kecerdasan sains dari anak-anak usia 15 tahun.

Hasil tersebut memang rawan kritik. Sebab, pelajar dari Cina yang menjadi sampel pengukuran ini berasal dari Beijing, Shanghai, Guangdong, dan Jiangsu, yang notabene adalah kota-kota besar di Cina yang

fasilitas pendidikannya jauh lebih baik ketimbang daerah-daerah rural lainnya di Cina.

Keberhasilan Cina menempatkan posisi tertinggi dalam PISA 2018 memberi pesan bahwa sarana dan prasarana yang memadai serta sistem pendidikan yang mutakhir, berperan banyak dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan serta generasi yang kompetitif.

Bagi pemerintah, hasil studi ini menjadi pengingat bahwa mereka memiliki pekerjaan rumah untuk pemerataan kualitas pendidikan. Bagi Indonesia, tantangan menuju ke sana memang berat, mengingat jumlah sekolah di Indonesia yang tercatat lebih dari 307.600 sekolah (swasta maupun negeri). Belum lagi, ada jurang bernama disparitas ekonomi yang menganga cukup lebar. Buktin-

ya, merujuk pada laporan PISA, sebanyak 64 persen siswa dari keluarga miskin, bersekolah di sekolah yang kurang layak, yang kekurangan guru dan bahan ajar.

Ikhtiar pemerintah untuk melakukan pemerataan pendidikan sebenarnya sudah berjalan. Salah satunya dengan penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Memang dengan kondisi yang sedemikian kompleks, upaya untuk melakukan pemerataan kualitas pendidikan ini membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang. Tidak bisa instan.

Namun, sembari memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk menuntaskan PR-nya melakukan pemerataan kualitas pendidikan, para pengelola sekolah (kepala sekolah dan guru) perlu berinisiatif mewujudkan



solusi-solusi lokal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Prinsipnya, di sekolah, di kelas, perlu ada gerakan perubahan. Dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi siswa misalnya, mengutip dari penjelasan Totok Suprayitno, Kabalitbang Kemendikbud, setidaknya ada 6 gerakan perubahan yang dapat dilakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas.

Pertama, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu didorong. Pasalnya, berdasarkan riset terungkap bahwa siswa dengan latar belakang sosial ekonomi yang sama, memiliki skor membaca 40 poin lebih tinggi ketika diajak oleh guru yang memanfaatkan TIK.

Kedua, siswa dapat dilibatkan dalam membaca. Sebab, siswa yang sering dilibatkan guru dalam pembelaja-

ran membaca, memiliki skor membaca 30 poin dibandingkan siswa yang tidak dilibatkan atau jarang terlibat. Strategi yang dapat dilakukan antara lain: mengajak siswa berpendapat, menceritakan kembali isi bacaan, mengaitkan bacaan dengan peristiwa di sekitar, membandingkan bacaan dengan topik sama, memberikan pertanyaan kritis yang memantik siswa memahami bacaan.

Ketiga, mulailah meninggalkan tradisi membaca nyaring. Sebab, hasil PISA menunjukkan strategi membacakan nyaring suatu bacaan bagi siswa lainnya tidak efektif untuk meningkatkan pemahaman isi bacaan bagi siswa usia 15 tahun. Sebaliknya, berkonsentrasi pada isi bacaan, menandai atau merangkum dengan kata-kata sendiri terbukti efektif untuk memahami isi bacaan.

Keempat, ajak siswa untuk merangkum, bukan menyalin. Sebab, aktivitas merangkum yang efektif dalam menumbuhkan kemampuan

membaca adalah yang mampu menangkap hal-hal yang penting dan menuliskannya kembali dengan kreativitas sendiri.

Kelima, membiasakan para siswa dengan jenis dan format bacaan yang beragam. Satu dari tiga siswa Indonesia mengaku hanya sekali atau bahkan tidak pernah diberikan tugas membaca teks yang berisi diagram atau peta

serta teks berbasis digital. Salah satu soal PISA 2018 yang sangat sulit bagi siswa Indonesia berasal dari bacaan yang berisi peta perairan dunia. Hanya 1 dari 30 siswa Indonesia yang mampu menjawab benar soal tersebut.

Keenam, tumbuhkan kebiasaan membaca saat luang. Sebab,

siswa yang menghabiskan waktu dengan membaca sebagai hiburan waktu luang capaian skor PISA terbukti lebih tinggi 50 poin dibandingkan siswa yang tidak memiliki kebiasaan membaca di waktu luang. ■

Bagus Priambodo

IKHTIAR PEMERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN SEBENARNYA SUDAH BERJALAN. SALAH SATUNYA DENGAN PENERAPAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB). MEMANG DENGAN KONDISI YANG SEDEMikian KOMPLEKS, UPAYA UNTUK MELAKUKAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN INI MEMBUTUHKAN WAKTU DAN PROSES YANG CUKUP PANJANG. TIDAK BISA INSTAN.



Melahirkan Pustakawan Profesional Demi Tumbuhnya Kemampuan Literasi

Upaya untuk memperkuat kemampuan literasi para pelajar di Indonesia membutuhkan dukungan berupa infrastruktur seperti perpustakaan. Namun, keberadaan perpustakaan juga akan sia-sia apabila tidak diimbangi dengan banyaknya pustakawan yang kompeten, inovatif, serta kreatif. Ibarat kata, perpustakaan dan pustakawan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.



BERDASARKAN data dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, jumlah pustakawan di Indonesia hingga Desember 2019 tercatat sebanyak 3.578 pustakawan. Sementara, jumlah perpustakaan di Indonesia hingga 164.610 perpustakaan. Banyaknya jumlah perpustakaan ini menempatkan Indonesia di urutan kedua negara-negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak. Di atas Indonesia, ada India yang memiliki 323.065.

Memang, beban untuk mendongkrak kemampuan literasi tidak bisa diletakkan semata pada perpustakaan dan pustakawan. Namun, setidaknya mereka inilah yang menjadi salah satu motor penggerak literasi di Indonesia.

Ironisnya, meski Indonesia berada

di peringkat kedua negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak, namun tingkat literasi di Indonesia rendah. Berdasarkan riset Central Connecticut State University, Amerika Serikat, yang dirilis pada Maret 2016, Indonesia berada pada posisi kedua terbawah dari 61 negara dalam hal literasi. Tak jauh berbeda, studi PISA 2018 yang digelar The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) terhadap para pelajar 15 tahun di sekitar 70 negara, menempatkan para pelajar Indonesia di peringkat kedua terbawah dalam hal kemampuan literasi.

Jumlah perpustakaan yang melimpah ini merupakan modal yang apik untuk mendongkrak kemampuan

literasi para pelajar di Indonesia. Kini, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah bagaimana mendorong minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan.

Untuk dapat melakukan itu, kita perlu terobosan. Pertama, kita membutuhkan para pustakawan yang mampu memetakan kebiasaan milenial dan memanfaatkannya untuk merancang program-program yang bisa mengundang mereka untuk mengunjungi perpustakaan. Dengan demikian pula, profesi pustakawan tak lagi hanya dipandang sebagai orang-orang yang membantu mencari buku bagi para pengunjung perpustakaan.

Kedua, kita membutuhkan para pustakawan yang bisa mendorong



terjadinya transformasi layanan perpustakaan menuju perpustakaan yang berbasis teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan.

Upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut telah dilakukan Perpustakaan Nasional. Salah satunya dengan terus mengencangkan sertifikasi pustakawan untuk mewujudkan pustakawan yang profesional dan kompeten. Selain itu, Perpustakaan Nasional juga memberikan penghargaan Pustakawan Terbaik tingkat Nasional. Melalui penghargaan ini, diharap-

kan para pustakawan di Indonesia semakin terdorong untuk berkarya dan berinovasi dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.

Selain itu, apabila kompetensi pustakawan meningkat, maka kita bisa berharap kualitas perpustakaan di Indonesia terus berkembang. Pada akhirnya, masyarakat akan terus terdorong untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berguna untuk mengangkatnya dari kebodohan dan kemiskinan.

Berikutnya, seorang pustakawan

juga harus didorong untuk lebih humanis serta aktif terlibat dalam komunitas-komunitas. Hal ini penting karena di masa depan, perpustakaan dituntut untuk tidak sekadar menjadi ruang baca, tetapi juga menjadi wadah untuk komunitas-komunitas tersebut saling berkolaborasi. Kecenderungan ini bisa kita lihat dengan semakin menjamurnya ruang-ruang seperti coworking space di berbagai kota yang menambahkan fasilitas-fasilitas perpustakaan atau ruang baca. ■

Bagus Priambodo

BACAAN & SUMBER RUBRIK TEROPONG



<https://www.kemdikbud.go.id>, <https://www.dw.com>, <https://nasional.kompas.com>, <https://www.kompas.com>, <https://www.jawapos.com>, <https://tirto.id>, <http://www.chinadaily.com>, <https://journals.sagepub.com>, <https://learningenglish.voanews.com>, <https://www.liputan6.com>, <https://news.detik.com>, <https://www.tribunnews.com>, <https://www.academia.edu>, <https://nasional.republika.co.id>, <https://www.antaranews.com>



Pendidikan Berdaya Saing Global

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim hadir menyampaikan kuliah umum pada acara Musyawarah Nasional ke-5 Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (16/12/2019). Mendikbud menyampaikan materi tentang Pendidikan Berdaya Saing Global.

REVOLUSI INDUSTRI 4.0 UNTUK DUNIA PENDIDIKAN INDONESIA

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyinggung konsep Revolusi Industri 4.0 yang dikaitkan dengan dunia Pendidikan di Indonesia. Nadiem menyampaikannya saat menjadi pembicara di kuliah umum acara Musyawarah Nasional ke-5 Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia pada Kamis (16/12/2019).

Nadiem Makarim membeberkan adanya keterkaitan penting antara

Revolusi Industri 4.0 dengan Pendidikan Indonesia yang akan menuju persaingan global. Masa depan Indonesia sangat dipengaruhi oleh dunia pendidikan.

Sektor pendidikan suatu negara memberikan cerminan masa depan bangsa. Di Indonesia pentingnya pendidikan persis seperti yang disampaikan oleh Al Arifin. Dalam Jurnalnya Pembangunan Pendidikan (2012), Al Arifin menyatakan sebuah negara harus berpikir bahwa pendidikan adalah perwujudan dari cita-

cita bangsa. Oleh karena itu, penentu negara telah mencapai perkembangan tak lain tak bukan dari sisi pendidikan yang dibawa bersaing dengan berbagai negara/bangsa di dunia.

Dalam praktiknya, Indonesia dituntut ikut menghadapi perubahan masa depan di dunia dari berbagai sektor. Perubahan tersebut menurut Nadiem terlihat dari 4 hal:

- Perubahan sisi organisasi
- Konsep kepemilikan
- Konsep bekerja, dan
- Konsep budaya, semuanya punya perubahan dramatis.

Zaman digitalisasi membentuk adanya konsep khusus dalam memandang dunia yang kita tinggali.

Saat ini, kita tidak hanya hidup dalam satu dunia seperti 20 tahun yang lalu. Ada 2 dunia kini beriringan bersama



kita, dunia itu mengalami perubahan dinamis dan tak bisa diprediksi. Yakni dunia nyata dan dunia digital.

Lalu, bagaimana meraih kemajuan dalam dunia pendidikan?

Seperti pepatah yang mengatakan 'Malu Bertanya Akan Tersesat di Jalan'. Enggan mengkritisi perkembangan zaman, maka akan tersesat dan tenggelam dimakan zaman. Tolok ukur perkembangan zaman satu di antaranya adalah teknologi yang tidak bisa dibendung bagaimanapun taktik kita ingin berusaha menghentikannya.

Mendikbud Nadiem Makarim menyinggung bahwa masa depan bangsa dilihat dari kualitas kaum penerus. Sosok-sosok tersebut adalah para generasi muda, anak-anak kita, penerus bangsa. Mereka sudah tidak lagi ada dalam pemahaman agar diajarkan menggunakan teknologi, karena kenyataannya semua anak lebih mahir menggunakan teknologi dibandingkan orang tua dan generasi di atas mereka.



Fokus lain yang harus diantisipasi adalah soal dampak-dampak yang ditimbulkan. Bagaimana cara mencegah adanya dampak negatif untuk mereka yang berusia masih sangat muda? Itulah gunanya peran orang tua dalam pengawasan dan bimbingan saat anak-anaknya menerima asupan teknologi yang begitu kompleks.

MENTAL REVOLUSI, SEMANGAT BERUBAH DEMI MASA DEPAN BANGSA

Dalam kuliah umum di acara Mu-syawarah Nasional ke-5 Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (16/12/2019), Mendikbud Nadiem Makarim juga menyampaikan, revolusi sebenarnya sudah sangat terlihat di depan mata, dan itu harus kita sadari. Ketika kita tidak memilih untuk mengikuti arus perkembangan, maka akan tenggelam. Dunia pendidikan ikut juga mengadakan konsep mental revolusi untuk perubahan masa depan bangsa.

Pertama. Perubahan yang terjadi adalah konsep dalam bekerja yang sedikit demi sedikit telah berubah. 10 tahun yang lalu, suasana yang dihadapi Indonesia adalah soal bekerja di satu waktu yang sama, lokasi yang sama, dan pekerjaan yang tidak bisa bercabang. Perkembangan teknologi memberikan dampak perubahan besar dalam konsep budaya bekerja saat ini.

Dapat kita lihat praktiknya di luar sana, digitalisasi membuat pekerjaan tidak lagi ada di satu waktu tetapi bisa bercabang. Paralel dengan lokasi yang berbeda. Dan tentu tanpa batasan dalam berkarya. Bisa saja pekerja kantor masa kini separuh waktunya untuk mengembangkan bisnis yang ia miliki secara digital. Banyak cara untuk berkarya secara independen demi mencari nafkah. Perubahan juga terlihat dari fragmentasi konsep status jabatan seperti bos dan bawahan yang sudah tak seperti dulu.

Kedua. Perubahan terlihat dalam konsep soal kepemilikan. Kita bisa memiliki banyak aset dan jasa tanpa harus memilikinya dengan cara mem-

beli. Hal-hal yang dulu harus dimiliki untuk bisa digunakan, kini bisa saja hanya menyewa. Misalnya seperti rumah, hotel, transportasi, semuanya ada dalam konsep yang bisa kita "sewa". Contoh-contohnya nyata seperti *house co-living*, *co-working*, semua kini bisa jadi milik bersama.

Ketiga. Perubahan generasi milenial dan pekerjaan yang tergantikan. Apa yang kita lihat dari milenial saat ini? Mereka bukan lagi membeli barang-barang baru, atau berlomba memiliki aset baru yang bisa dipamerkan. Milenial akan bertukar informasi dan menunjukkan prestasi mereka mendapatkan pengalaman (*experience*). Hal itulah yang tentu akan merubah struktur ekonomi negara Indonesia beberapa tahun ke depan.

Perubahan struktur ekonomi itu tentu saja berdampak juga pada efisiensi suatu perusahaan melihat peluang menyediakan sumber daya secara efisien. Berbagai sektor akan mengalami yang dinamakan 'Otomasi'. Mengacu kepada adanya pekerjaan-pekerjaan yang tergantikan terutama pekerjaan yang bersifat manual, akan hilang secara otomatis.

Ada konsep bahwa teknologi tidak akan bisa dibendung selamanya sepanjang sejarah manusia. Hal itu benar adanya. Coba bayangkan ketika kita ada dalam mesin waktu yang membawa kita ke masa depan. Ketika melihat banyak mesin baru, mungkin kita akan melongo dan kaget, ditambah jika tidak mampu mengoperasikan kerja mesin itu, kita akan hilang dan tenggelam.

Teknologi tersebut tidak hanya menyentuh sektor industri, hiburan, sosial, dan budaya saja, tetapi juga soal pendidikan sebagai cita-cita bangsa.

KONSEP PERUBAHAN REVOLUSI PENDIDIKAN DI INDONESIA, 'MERDEKA BELAJAR'

Pemerintah Indonesia serius dalam menangkap perubahan revo-

lusi yang juga terjadi dalam dunia pendidikan. Dunia dalam 20 tahun lagi tidak bisa diprediksi, itulah alasan utama pemerintah memiliki cara untuk menyiasati dinamisme revolusi industri. Sistem pendidikan mau tidak mau harus mengikuti apa yang terjadi dengan arus revolusi satu dekade ke depan.

Bagaimana sistem pendidikan di Indonesia melihat perubahan tersebut? Mendikbud Nadiem Makarim dalam kuliah umum di acara Musyawarah Nasional ke-5 Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (16/12/2019) mengungkapkan pula adanya konsep soal mengasah inovasi.

Inovasi akan sangat erat hubungannya dengan daya saing tinggi di era global. Indonesia termasuk negara yang harus mengembangkan inovasi sebagai bentuk standarisasi kualitas negara baik. Berdasarkan laporan *World Economic Forum* pada tahun 2006 posisi daya saing Indonesia berada pada urutan 50 diantara 125 negara. Berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa Indonesia saat ini relatif tertinggal dalam percaturan ekonomi dunia yang telah mengarah ke era globalisasi.

Beberapa pengamat dan ahli manajemen menyatakan bahwa inovasi menjadi jaminan untuk perusahaan atau organisasi dalam meningkatkan daya saingnya. Pernyataan tersebut banyak didukung dengan hasil penelitian atau bukti empiris. Pembahasan soal inovasi juga menjadi tolok ukur penting yang disinggung Nadiem Makarim dalam pidatonya.

Mengacu pada hubungan dengan sistem pendidikan di Indonesia, kualitas pendidikan Indonesia akan penting untuk dunia. Meski tidak dapat diprediksi, tetapi tetap pada indikator tertentu yang bisa diperhitungkan.

Misalnya seperti mengasah inovasi, kreativitas, kolaborasi, berpikir kritis, komunikasi, *problem solving* dan *compassion* (rasa cinta dan kasih

kepada sesama makhluk Tuhan).

Nadiem Makarim menekankan semangat yang ditonjolkannya dalam masa kerjanya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019-2021. Ia mengusung konsep 'Merdeka Belajar' untuk melakukan lompatan-lompatan inovasi dalam Kemendikbud.

Catatan khusus diberikan oleh Nadiem soal dunia nyata yang pada akhirnya akan menciptakan kemerdekaan dan kemandirian besar. Hal itu harus ditanggapi serius oleh para generasi muda. Bila generasi muda tidak beradaptasi maka mereka akan tersingkir. Sehingga oleh Kemendikbud dihimbau agar generasi muda terus diarahkan menuju inovasi 4.0

INTERPRETASI INOVASI PENDIDIKAN INDONESIA DIAWALI DARI KONSEP 'MITRA'

Anak-anak Indonesia diarahkan untuk belajar, bebas untuk berkreasi



dan harus mampu beradaptasi secara fleksibel. Dalam praktiknya, isu mendasar adalah soal konsep hubungan antara guru dan murid, dosen dan mahasiswanya, tenaga pendidik dan penerima ilmu.

Di kesempatan yang sama, Mendikbud Nadiem Makarim menilai harus ada perubahan yang terjadi dalam cara berpikir para guru, dosen dan pembimbing murid di sekolah atau universitas.

Disampaikan oleh sang Menteri bahwa konsep yang harus dibawa adalah soal tuntutan kepada tenaga pengajar agar melihat murid dan mahasiswa tersebut sebagai mitra. Bukan lagi sebagai bawahan, atau orang yang posisinya lebih rendah. Adanya kesetaraan status itu akan memantik kebebasan dan kemerdekaan dalam belajar. Singkatnya, sama-sama belajar.

Untuk pertamakalinya di Indonesia, tuntutan masa depan, memaksa



guru dan dosen, untuk melihat murid dan mahasiswa itu sebagai MITRA agar setara.

Paradigma tersebut akan menghasilkan sesuatu yang baru. Tidak lagi soal konsep atasan dan bawahan, satunya mengajar lainnya belajar, tetapi lebih kepada memulai untuk berubah menjadi setara, sehingga akan terjadi relasi timbal balik yang menguntungkan. Jika tidak dilakukan maka perubahan tidak akan bisa dimulai, padahal itu yang dibutuhkan untuk masa depan bangsa.

Kemudian, juga muncul sebuah gagasan kepada para tenaga pengajar/pendidik. Gagasan ini harus ada di benak para guru, dosen, dan pengajar. Apa tujuan mereka menularkan ilmu kepada orang-orang di sekitarnya?

Itulah pentingnya menyadari tujuan mereka saat sedang mendidik, melontarkan pertanyaan kepada diri sendiri yakni "Apa dampak positif dari hal-hal yang saya ajarkan bagi murid/

mahasiswa ini, terutama untuk masa depan dia?"

Pengertian inovasi oleh sebagian besar orang di Indonesia juga masih kerap kali salah persepsi. Gagasan yang selama ini muncul adalah soal perubahan inovasi yang berasal dari hal-hal yang terlihat secara kasat mata. Misalnya adanya keberadaan sekolah-sekolah khusus tenaga kerja (vokasi) hingga pengadaan pusat inovasi. Pusat inovasi itupun masih diinterpretasikan sebagai gedung, hingga adanya tempat-tempat khusus lain yang terlihat.

Padahal perubahan inovasi bukan soal hal-hal kasat mata, karena pengertian inovasi sendiri adalah hasil dari suatu budaya yang tercipta. Menurut Mendikbud, inovasi bisa dikerjakan tanpa adanya pembangunan pusat inovasi, gedung tinggi untuk mewadahi gerakan inovasi, ataupun sistem khusus untuk mewujudkan inovasi.

Inovasi adalah soal budaya dan perkembangannya. Budaya apa yang dimaksud?

Budaya lahir dari pemikiran yang sudah mendarah daging soal suatu pemahaman. Budaya bisa berupa pemahaman yang terus dikembangkan, budaya berinovasi, budaya kolaborasi, budaya ingin tahu, budaya *growth mindset* hingga budaya agar tidak malas berpikir demi kemajuan bangsa.

Tak usah pakai gedung khusus untuk jadi pusat inovasi, jika ada segerombolan manusia punya pemahaman yang sama dengan mindset sama yang terus dikembangkan, maka pengertian inovasi sudah sangat dekat.

INOVASI DATANG DARI KEBEBASAN

Pertama, inovasi harus datang dari kebebasan karena dimerdekakan. Merdeka adalah kondisi ketika secara independen kita bebas melakukan apapun yang ingin kita lakukan. Bagaimana relasi antara pendidikan yang berasaskan kebebasan? Apakah

hal itu efisien dengan perkembangan zaman, mengingat aturan adalah indikator penting dalam segala tindakan?

Pencapaian kebebasan yang dimaksud adalah dalam hal berinovasi, berkreasi dan toleransi terhadap setiap kegagalan.

Membicarakan kegagalan, hal ini menjadi faktor utama yang harus ada dalam berinovasi. Inovasi datang dari kebebasan untuk mencoba hal-hal baru, namun inovasi tidak mungkin terjadi tanpa adanya toleransi terhadap kegagalan. Inovasi harus terdiri dari berbagai kegagalan yang bersinergi menjadi suatu perubahan.

Kedua, bahwa harus ada tindakan untuk menghilangkan sekat yang ada di antaranya. Sekat-sekat seperti perbedaan antara sistem universitas milik swasta dan milik pemerintah, sekat pembatas interaksi antara mahasiswa dan dosen, guru dan murid, hingga sekat perbedaan antar organisasi.

Saya organisasi A dan anda organisasi B, padahal kenyataannya kolaborasi akan menghasilkan buah-buah pemikiran baru yang bisa melebur membentuk inovasi. Sekat tersebut harus lebih dahulu dibuang jauh-jauh.

Dalam pidatonya pada kuliah umum di acara Musyawarah Nasional ke-5 Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (16/12/2019), Mendikbud Nadiem Makarim justru sangat menghargai berbagai perdebatan yang muncul dan berbeda antara satu dan lainnya. Perdebatan akan mewujudkan inovasi yang variatif untuk berkembang. Satu hal yang ditekankan Sang Menteri Millennial adalah sikap mengundang berbagai elemen manusia dalam diskusi penting masa depan bangsa. Semakin banyak pendapat yang berbeda-beda akan semakin tinggi tercipta kemungkinan dalam berinovasi. ■

Bagus Priambodo
Sumber narasi "You Tube Channel"
Kemendikbud RI: <https://www.youtube.com/watch?v=oN9D22y0Y4>

Moda Penting Penggerak Inovasi Pendidikan untuk Revolusi 4.0

PADA kesempatan memberikan kuliah umum di acara Musyawarah Nasional ke-5 Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (16/12/2019), Mendikbud Nadiem Makarim berdiskusi langsung dengan para peserta. Sang Menteri menginginkan diskusi dua arah untuk membahas rencana kerjanya hingga masa depan pendidikan bangsa Indonesia. Beberapa pertanyaan yang dilemparkan adalah soal ekonomi yang digerakkan dari dunia pendidikan.

Perekonomian bangsa dari sektor pendidikan mengacu pada indikator inovasi yang dihasilkan. Pemahaman awam menyiratkan ada perbedaan antara universitas luar negeri dan dalam negeri. Banyak anggapan bahwa prodi dan jurusan di Indonesia tidak lebih baik daripada universitas luar.

Pada kenyataannya, hal itu salah besar, perubahan yang dilakukan hingga kini sudah memperlihatkan hasil baik. Banyak prodi dan jurusan di universitas Indonesia lebih mumpuni ketimbang universitas luar negeri. Persaingan itu memicu inovasi harus lebih dinamis lagi.

Perubahan lain yang ditekankan lagi-lagi soal para pelaku dunia pendidikan.

Pertama, perubahan paradigma dosen-mahasiswa, guru-murid sebagai mitra, saling belajar satu sama lain dan melebur menjadi satu.

Kedua, anggapan bahwa tidak akan ada universitas di Indonesia yang bertaraf dunia jika tidak ada peleburan. Peleburan antara dunia sosial, dunia penelitian (*research*), dunia industri. Kolaborasi yang dilakukan itulah yang menjadi MODA utama penggerak perubahan.

Pernahkah membayangkan pendidikan Tanah Air 10 tahun ke depan? Tenaga pendidik penggerak menjadi kunci perubahan. Mereka harus paham betul MODA utama perubahan yakni kolaborasi.

Yang terjadi di lapangan saat ini masih banyak keluhan datang terutama dari para tenaga pendidik tersebut. Bagaimana mereka mampu melakukan perubahan jika masih

memikirkan kesejahteraan hidupnya? Permasalahan itu lalu menjadi PR Kemendikbud RI.

Isu yang muncul misalnya tentang status para guru honorer yang penghasilannya baru didapatkan 3 bulan sekali. Bagaimana mereka mengatasi diri untuk mengabdikan demi pendidikan tetapi kesejahteraannya sendiri belum terpenuhi?

Kemendikbud yang diwakili oleh Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan menyampaikan alasan di balik isu yang berkembang tersebut. Bahwa rupanya kewenangan tidak hanya dimiliki oleh Kemendikbud sebagai instansi tertinggi. Beberapa sekolah di daerah terpencil adalah milik pemerintah daerah. Penting untuk merumuskan masalah itu dengan kolaborasi dari berbagai pihak. Isu yang dimunculkan tidak simpel tetapi bersifat sangat kompleks sehingga harus berangkat dari kolaborasi diskusi berbagai instansi terkait lebih dulu.

Masih bicara soal tenaga pendidik, dalam niatnya untuk memajukan dunia pendidikan, sudahkah mereka mendapatkan kesejahteraan dalam karirnya? Hal itu dianggap Nadiem Makarim sebagai prioritas

utama. Karir para tenaga pendidik terbelenggu dengan regulasi dan syarat khusus yang ribet. Sudah menjadi keinginan besar Nadiem agar bisa menyelesaikan masalah tersebut satu per satu. Nadiem menyinggung kembali soal filsafat pendidikan yang ia pahami, yakni bahwa menggerakkan masa depan pendidikan Indonesia harus berasaskan 'Merdeka Untuk Belajar'.

Dalam sambutannya, Nadiem Makarim meminta agar para peserta terutama dosen-dosen dan alumni UIN bersedia membantunya mewujudkan asas merdeka dalam belajar dengan menyampaikan aspirasi lewat media sosial. ■

Bagus Priambodo

Sumber narasi "You Tube Channel" Kemendikbud RI: <https://www.youtube.com/watch?v=oN9D22yd0Y4>





**LEMBAGA PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN (LPMP)
JAWA TIMUR**

Jl. Ketintang Wiyata No.15 Surabaya

**TANPA
DIPUNGUT
BIAYA**

DUMAS

ADUAN MASYARAKAT

JENIS PENGADUAN:

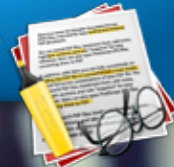
**PENYALAHGUNAAN
WEWENANG
PEGAWAI LPMP
JATIM**



**PELANGGARAN
KEDINASAN &
KINERJA PEGAWAI
LPMP JATIM**



**PELANGGARAN
DISIPLIN PEGAWAI
LPMP JATIM**



PERMINTAAN INFORMASI

SILAT : <https://lpmpjatim.kemdikbud.go.id/silat/?aduan>

Email : set.lpmpjatim@kemdikbud.go.id

Web : <https://lpmpjatim.kemdikbud.go.id/site/>

SMS

081234834444



**LEMBAGA PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR**
Jl. Ketintang Wiyata No.15 Surabaya



Silat

**SISTEM INFORMASI
LAYANAN TERPADU**

KAMI SIAP

[SOLUTIF, INFORMATIF, AKURAT, PRIMA]

Melayani Anda

LAYANAN KAMI:

- ★ Layanan Data & Informasi Mutu Pendidikan (NUPTK, Sertifikasi, Dapodik, Standar Nasional Pendidikan, Hasil Ujian Nasional)
- ★ Layanan Data & Informasi Penilaian Angka Kredit Guru Golongan Ruang IV/b ke atas
- ★ Layanan Supervisi Mutu Pendidikan
- ★ Layanan Kerjasama Penjaminan Mutu Pendidikan
- ★ Layanan Permohonan Narasumber
- ★ Layanan Peminjaman Sarana & Prasarana

PERMINTAAN INFORMASI

e-mail: set.lpmpjatim@kemdikbud.go.id



081234834444



lpmpjatim.kemdikbud.go.id/site/



lpmpjatim.kemdikbud.go.id/silat/

